

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Telur ikan terbang menjadi salah satu devisa ekonomi terbesar bagi Sulawesi Selatan hingga tahun 2024 ini. Harga jualnya begitu tinggi sehingga begitu menggiurkan untuk bekerja mencari telur ikan terbang sebagai sumber pemasukan ekonomi. Dalam kurun sepuluh tahun terakhir, nilai jualnya berkisar empat ratus ribu hingga bahkan menyentuh angka satu juta per kilogram.¹

Telur ikan terbang memiliki kandungan nutrisi yang baik dan bisa diolah ke dalam berbagai jenis makanan sehingga begitu digemari oleh masyarakat global. Di Jepang sendiri bahan baku makanan ini menjadi komposisi pelengkap menu makanan. Telur ikan terbang ini memang ditangkap untuk dijual ke pasaran global (diekspor). Negara-negara seperti, Jepang, China, Korea Selatan, Thailand, Taiwan, (di Asia), dan Russia (di Eropa) menjadi tujuan ekspor barang lainnya ‘emas dari laut’ tersebut.²

Di Sulawesi Selatan, nelayan pencari telur ikan terbang (*bayao torani*) banyak terdapat di Kabupaten Takalar, khususnya daerah Galesong (Selatan dan

¹Nilai jual satu juta ini terjadi pada tahun 2022. Lihat dalam Ilham Wasi, “Harga Fantastis Telur Ikan Terbang, Per Kilogram Tembus Jutaan Rupiah”, *Harian Fajar*, 10 Juli 2024, <https://harian.fajar.co.id/2024/07/10/harga-fantastis-telur-ikan-terbang-per-kilogram-tembus-jutaan-rupiah/>, diakses pada 30 November



Danang Sugianto, “Perjuangan Eksportir Telur Ikan Terbang Sulsel Pasar Asia”, *Detik*, 5 April 2017, <https://finance.detik.com/industri/d-perjuangan-eksportir-telur-ikan-terbang-sulsel-tembus-pasar-asia>, ada 17 Desember 2023.

Utara). Selain di Galesong, di Mappakasunggu dan Mangarabombang (Kabupaten Takalar) juga terdapat nelayan yang bekerja mencari telur ikan terbang.³ Lebih lanjut, beberapa nelayan pencari telur ikan terbang di daerah lain di Sulawesi Selatan juga dapat ditemukan di Majene, Mamuju, dan Polewali Mandar (saat ini masuk wilayah Sulawesi Barat).⁴ Khusus di Takalar, terutama daerah Galesong, nelayan pencari telur ikan terbang ini disebut dengan istilah *patorani*.

Perburuan telur ikan terbang oleh *patorani* Galesong sekarang ini dilakukan di banyak lokasi perairan yang memiliki kadar garam tinggi di Indonesia, seperti Laut Seram, Laut Flores, Selat Makassar, hingga ke perairan perbatasan Australia.⁵ Keadaan ini mulai terjadi pada tahun 2002, ditandai dengan adanya kapal-kapal asal Sulawesi Selatan menyambangi Laut Seram untuk mencari telur ikan terbang, dan menjadikan Fak-Fak sebagai kota tumpuan (Papua Barat).⁶ Sebelumnya, *patorani* Galesong hanya fokus mencari di perairan Selat Makassar dan dekat Laut Flores, dan ketika masa inilah yang menjadi fokus pada kajian ini.

Di Selat Makassar dan dekat Laut Flores, terdapat lebih dari sepuluh spesies ikan terbang atau hampir dua puluh spesies yang telah diidentifikasi di perairan

³Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar, *Kabupaten Takalar Dalam Angka 2015*, (Takalar: Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar, 2015), hlm. 155.

⁴Abdi Febriady, “Nelayan di Polman ‘Panen’ Telur Ikan, Harganya Capai Rp 400 Ribu Per Kilo”, *Detik*, 28 Juni 2020, <https://news.detik.com/berita/d-5071377/nelayan-di-polman-panen-telur-ikan-harganya-capai-rp-400-ribu-per-kg>, diakses pada 25 November 2024.

⁵Anugrah Nontji, *Laut Nusantara*, (Jakarta: Djambatan, 1987), hlm. 240 -

⁶Zuni Trikusumo Wati, “Pemanfaatan Ikan Terbang dan Telur Ikan Terbang Asia”. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan Dan Perikanan, (2021), hlm. 13.



timur Indonesia.⁷ Telur ikan terbang yang dikumpulkan *patorani* Galesong teridentifikasi paling dominan berasal dari ikan terbang berspesies *cheilopogon cyanopterus*, *hirundichthys oxycephalus*, dan *parexocoetus mento*.⁸ Spesies-spesies ini memasuki usia matang ketika berukuran 150 – 170 milimeter atau ukuran ikan terbang di Selat Makassar dan Laut Flores yang menghasilkan telur berkisar pada ukuran 150 – 230 milimeter.⁹ Diameter telur yang dihasilkan ikan tersebut berkisar pada ukuran 0,33 – 2,36 milimeter.¹⁰ Di perairan Indonesia lebih timur lagi, seperti di Laut Seram, ukuran ikan terbang gonad juga tidak berbeda jauh dengan yang ada di Selat Makassar dan Laut Flores, berkisar pada ukuran 180 – 240 milimeter. Salah satu spesies dengan ukuran tersebut dan juga sering ditemukan setiap musim di Laut Seram adalah *cheilopogon abei*.¹¹

Permulaan pembelian telur ikan terbang dari Sulawesi Selatan untuk tujuan ekspor ini erat kaitannya dengan negara Jepang. Pada 1969 korporasi asal Jepang melakukan kerja sama internasional dengan Indonesia untuk memperoleh telur ikan

⁷M. N. Nessa, dkk., “Studi Pendahuluan terhadap Perikanan Ikan terbang di Selat Makassar”, *Majalah Unhas VIII/XVIII*, No. 13, 1977, (Edisi Khusus Pola Ilmiah Pokok) dalam Augy Syahailatua, dkk., “Keragaman Jenis dan Distribusi Ukuran Panjang Ikan Terbang di Perairan Indonesia Timur”, *Jurnal Perikanan*, Vol. 8, No. 2, 2006, hlm. 263.

⁸Augy Syahailatua, “Perikanan Ikan Terbang di Indonesia: Riset menuju Pengelolaan”, *Oseana*, 2006; Augy Syahailatua, dkk., “Strategi Reproduksi Ikan Terbang (*Exocoetidae*) dan Kaitannya dengan Faktor Oseanografi di Perairan Indonesia”, *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia*, Vol. 14, No. 3, 2008, dalam Firman Ferdiansyah dan Augy Syahailatua, “Fekunditas dan Diameter Telur Ikan Terbang di Selat Makassar dan Utara Bali”, *Bawal*, Vol. 3, No. 3, Desember 2010, hlm. 195



Augy Syahailatua, dkk., *loc. cit.*

Firman Ferdiansyah dan Augy Syahailatua, *loc. cit.*

Friesland Tuapetel, “Biologi Reproduksi Ikan Terbang *Cheilopogon abei* 96 di Perairan Selat Geser Seram Timur”, *Jurnal Iktologi Indonesia*, Vol. , Mei 2021, hlm. 168.

terbang pada 1969.¹² Munculah kemudian angka-angka ekspor telur ikan terbang dari Sulawesi Selatan ke Jepang.¹³ Kerja sama ini pada gilirannya memicu *patorani* Galesong berburu telur ikan terbang dari yang sebelumnya hanya mengutamakan induknya.

Selama periode Pelita II (1974-1977), komoditas ekspor yang paling menguntungkan bagi Sulawesi Selatan salah satunya adalah telur ikan terbang.¹⁴ Benar saja, pada masa tersebut harga per kilogramnya menjadi yang tertinggi dibanding hasil laut lainnya. Tidak berhenti di situ, telur ikan terbang terus masuk dalam deretan barang ekspor penting bagi Sulawesi Selatan hingga memasuki era 2000-an.

Nilai jual yang tinggi ini pada satu sisi menawarkan keuntungan besar bagi para pihak yang terlibat dalam perdagangannya. Namun, pada sisi lain harga yang tinggi pada gilirannya hanya menjadi perangkap bagi mereka untuk selalu bekerja menyalurkan kekayaan bagi pihak lain. Mereka sendiri sulit maju secara ekonomi. Penyebabnya ada pada sistem kerja yang terbangun di dalamnya. Maka persoalan mengenai mengapa mereka terus bertahan dalam waktu yang lama bekerja mengumpulkan telur ikan terbang bukan hanya tentang tingginya nilai jual, melainkan juga dapat dilihat pada sistem kerja yang cenderung kompleks dengan

¹²M. Y. Mustafa dkk, "Japanese Enterprises Role on Smes Development in Indonesia: Inside Tobiko Export and Import", *Hasanuddin Economics and Business* Vol. 2 No. 2, (2018), hlm. 87.

Bailey, *Indonesian Marine Capture Fisheries*, International Center for quatic, (Manila, 1987). hlm. 46.

"Nilai Ekspor Sulsel Naik", *Suara Karya*, 18 Januari 1980, No. 2677, hlm.



desain yang menempatkan para *patorani* tetap berada dalam lingkaran sistem kerja tersebut.

Masalahnya adalah banyak *patorani* Galesong tidak memiliki sumber daya material pendukung aktivitas melaut untuk menangkap telur ikan terbang. Tidak hanya biaya melautnya, tetapi juga biaya untuk kebutuhan keluarga selama di tinggal melaut dalam waktu hampir satu bulan. Hampir semua *patorani* di Galesong bergantung pada orang lain yang akrab disebut sebagai *papalele* untuk menutupi kebutuhan tersebut.¹⁵ *Patorani* sendiri bekerja sebagai *pinggawa* (nahkoda kapal) dan *sawi* (anak buah kapal) di kapal milik *papalele*. Kendati demikian, ada *patorani* yang memiliki kapal sendiri, tetapi modalnya diperoleh dari *papalele* atau pihak lain, dan jumlahnya sangat sedikit.

Papalele juga yang membeli hasil tangkapan nelayan.¹⁶ Dari *papalele* kemudian dibawa ke perusahaan yang berperan mendistribusikannya ke pasar internasional (eksportir). Salah satu perusahaan besar saat itu yang berperan dalam mendistribusikan telur ikan terbang ke pasar global atau ke Jepang adalah PT. Sumber Laut. Tidak hanya mengekspor, perusahaan ini atau pemiliknya juga

¹⁵Keberadaan pemodal dalam struktur pelayaran bukan lagi hal baru. Sejak zaman kuno, praktik semacam itu lazim ditemukan. Di abad 16, Tome Pires mencatat bahwa raja-raja Pahang, Kampar, dan Indragiri bukanlah seorang pedagang. Bahkan mereka terlihat pasif dalam kegiatan perdagangan laut kala itu. Namun, mereka memiliki kantor dagang di Malaka dengan menempatkan wakil-wakilnya. Mereka menanam saham di sana. Saham merekalah yang menjadi bekal



uang untuk berlayar dan berdagang. Baca Adrian. B. Lopian, *Pelayaran iagaan Nusantara Abad Ke-16 dan 17*, (Yogyakarta: Komunitas Bambu, m. 60.

Herdiana, “Analisis Pola Distribusi Usaha Telur Ikan Terbang Di an Galesong Kabupaten Takalar”, *Gara*, Vol. 13, No. 1, (2019), hlm. 26.

memiliki banyak perahu yang digunakan *patorani* di Galesong. Tidak hanya itu, tetapi juga membiayai para *patorani* tersebut.

Dalam struktur perdagangan telur ikan terbang, *patorani* menempati kelas paling bawah. Terlebih lagi *patorani* non-pemilik sumber daya pendukung, hasil tangkapan yang mereka peroleh sejatinya bukan mereka yang menikmati secara maksimal. Apalagi pendapatan mereka tergantung dari hasil tangkapan. Dengan kata lain, persentase pembagian pendapatan bersih mereka berlaku jika hasil tangkapan sudah melebihi modal yang mesti dikembalikan dan juga keuntungan pemodal itu sendiri. Inilah perbedaan bekerja sebagai *pinggawa-sawi* dengan buruh-buruh di pabrik-pabrik industri yang sudah pasti mendapat gaji setiap bulan sekalipun jumlahnya terkadang tidak sesuai dengan waktu kerja yang mereka habiskan.

Papalele memiliki kuasa dalam menentukan nilai beli telur ikan terbang dari *patorani*. Diantara nelayan, *pinggawa* mendapat upah lebih tinggi dibanding *sawi*.¹⁷ Di kalangan *sawi* pun pendapatannya juga berbeda, sebab peran mereka juga berbeda-beda. Hal ini terjadi seturut dengan pergeseran teknologi penggerak perahu pada 1980-an dan 1990-an, dari layar ke mesin.

Pertanyaannya kemudian, mengapa *patorani* di Galesong terus menjalankan aktivitas perburuan telur ikan terbang dengan sistem kerja yang timpang tersebut?

Masalah ini tentu tidak sesederhana karena harga jual barang tinggi atau karena sudah turun-temurun menjadi nelayan yang menangkap ikan terbang.



Herdiana, *loc. cit.*

Masalah sistem kerja ini telah berlangsung selama *patorani* mencari telur ikan di Selat Makassar (1969 – 2001). Olehnya, masalah inilah yang menjadi sasaran dari kajian ini. Mengingat, kajian yang berlandaskan historisitas dari persoalan sistem kerja sosial ekonomi nelayan telur ikan terbang pada masa lalu masih sangat langka.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berguna untuk membatasi kerja penulis dalam mengumpulkan sumber-sumber. Selain itu, adanya rumusan masalah menjadi penjabar dan penegas fokus penelitian yang hendak penulis lakukan.

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.) Mengapa nelayan di Galesong memilih menjadi penangkap telur ikan terbang (*patorani*)?
- 2.) Kondisi sosial-ekonomi apa yang mendukung para *patorani* di Galesong terus bertahan menangkap telur ikan terbang?

1.3. Batasan Masalah

Kajian sejarah selalu menekankan dua aspek atau batasan penting yang kemudian membentuk kekhasan cirinya. Kedua batasan tersebut yaitu spasial (ruang/wilayah) dan temporal (waktu). Olehnya, penelitian ini memilih wilayah Galesong (mencakup Kecamatan Galesong Selatan, Galesong Utara, dan Galesong), Kabupaten Takalar. Alasan dari pemilihan ini karena Galesong menjadi tempat paling banyak ditemukan nelayan yang mencari telur ikan terbang di Sulawesi Selatan, sekaligus sebagai penghasil telur ikan terbang terbesar di Sulawesi Selatan, bahkan untuk skala Indonesia.



mentara temporalnya, penulis batasi dari tahun 1969 sampai 2002. an tersebut bertalian dengan permulaan aktivitas penangkapan telur ikan

terbang di Galesong, yakni tahun 1969. Lokasi penacarian hanya di Selat Makassar dan dekat Laut Flores. Pada tahun 2002, lokasi pencarian telur ikan terbang mengalami perluasan, yaitu dimulainya pencarian di perairan bagian timur Indonesia, seperti di Laut Seram dan sekitarnya. Inilah yang kemudian menjadi alasan pembatasan kajian hanya sampai tahun 2002. Kajian difokuskan pada *patorani* Galesong yang hanya beroperasi di Selat Makassar dan dekat Laut Flores saja, yang menurut saya ini menjadi periode babakan awal pencarian telur ikan terbang untuk tujuan ekspor oleh *patorani* Galesong.

1.4. Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis proses yang membuat nelayan di Galesong memilih bekerja mencari telur ikan terbang (*patorani*).
2. Menganalisis kondisi sosial-ekonomi yang membuat nelayan di Galesong bertahan bertahan bekerja sebagai *patorani*.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi atas dua jenis, yaitu manfaat secara akademik dan praktis. Adapun manfaat secara akademik penelitian ini, yaitu:

1. Hasil penelitian ini bisa menambah perbendaharaan literatur sejarah maritim ‘orang-orang kecil’ yang memiliki kondisi sosial ekonomi yang kompleks.
2. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan atau titik berangkat penelitian-penelitian akan berkembang di masa-masa mendatang mengenai telur ikan terbang, baik di Sulawesi Selatan maupun di Indonesia.



Sedangkan manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian diharapkan bisa menjadi penegas posisi Galesong, Kabupaten Takalar, sebagai bagian dari integritas wilayah yang membentuk jaringan perdagangan maritim dunia.
2. Penelitian ini paling tidak dapat menjadi rujukan pembuatan kebijakan pemerintah dalam menangani masalah sistem kerja dalam perdagangan telur ikan terbang yang menempatkan *patorani* sebagai pihak paling dirugikan.

1.6. Tinjauan Pustaka

1.6.1. Penelitian yang Relevan

Jika memperhatikan buku-buku pengantar sejarah maritim Indonesia, maka kita akan menemukan kesan bahwa historiografi maritim kita masih teramat fokus pada tema-tema tentang raja dan kerajaan yang berkuasa di pesisir, jaringan pelayaran dan perdagangan, dan juga pertumbuhan kota-kota pelabuhan serta kebijakan tentang pelabuhan itu sendiri. Belakangan, tema tentang diaspora juga mulai diminati untuk memperlihatkan betapa laut tidaklah mesti dipandang sebagai pemisah, tetapi sebagai jembatan yang menghubungkan satu pulau dengan pulau lainnya.

Mungkin lantaran kurangnya bacaan, tetapi karya sejarah yang fokus pada kehidupan sosial-ekonomi serta perubahan-perubahan yang terjadi di kalangan masyarakat maritim masih sangat jarang dijumpai. Di Sulawesi Selatan sendiri, sejarah kemaritiman hanya dipenuhi oleh kisah-kisah yang berkaitan dengan

...an Kerajaan Gowa-Tallo berlakon di sektor perdagangan laut
...sa. Atau tidak, tentang komoditas unggul yang memiliki keuntungan



besar dan menjadikan Makassar sebagai tempat yang begitu ‘diperhitungan’ dalam dunia global. Atau lagi tentang tangguhannya kapal padewakang dan phinisi mengarungi samudera. Sementara kajian sejarah sosial ekonomi pada masyarakat nelayan yang pergi melaut masih minim dijumpai. Terlebih kajian sejarah terkait nelayan *patorani* yang fokus menangkap telur ikan terbang yang baru mulai pada akhir 1960-an atau awal 1970-an hampir tidak ditemukan.

Tulisan Suwaib Amiruddin (2017) berjudul *The Changing of Tradisional Fishing Community to Patorani Fisherman in Takalar South Sulawesi*,¹⁸ menyajikan pergeseran peralatan yang digunakan *patorani* Galesong ketika mereka telah fokus berburu telur ikan terbang. Peralatan paling disoroti adalah perahu, dari mulanya mengandalkan layar berubah ke mesin. Perubahan ini dilihatnya memiliki kaitan dengan perubahan fokus nelayan, dari menangkap ikan bergeser fokus pada telur ikan terbang. Pengaruh dari luar, dalam hal ini Jepang, yang melakukan komersialisasi telur ikan terbang kemudian menjadi determinan perubahan fokus *patorani* Galesong tersebut.

Tulisan ini juga telah menyajikan sistem sosial yang menjadi landasan kerja dari perburuan telur ikan terbang. Prinsip kekerabatan dalam merekrut tenaga kerja hingga menjalankan aktivitas pekerjaan mereka, baik di darat maupun di laut, berganti pada sistem kontraktual dan lebih profesional. Tekait mekanisme kerja sudah disinggung dalam tulisan ini, tetapi fokus penjelasan mengenai proses yang membuat hubungan antara *patorani* (*pinggawa-sawi*) dengan *papalele* dan



Suwaib Amiruddin, “The Changing of Tradisional Fishing Community to Fisherman in Takalar South Sulawesi”, *Saudi Journal of Humanities and iences*, Vol. 2 No. 9, (2017), hlm. 771 – 781.

eksportir melalui mekanisme kerja yang ada dapat bertahan hampir tidak ditemukan, serta dengan mekanisme kerja yang ada pada akhirnya membuat *patorani* tidak dapat bergerak maju secara ekonomi belum hadir dalam kajian ini.

Satu hal juga yang saya tidak sejalan dengan argumen dari Guru Besar Sosiologi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ini, yang mengatakan bahwa dengan meningkatnya harga telur ikan terbang di awal tahun 2000-an menjadikan pendapatan para *patorani* semakin meningkat. Saya kira beliau terlalu terburu-buru dalam menyimpulkan hal ini dan terkesan mengeneralisir, sebab dengan kondisi banyak *patorani* Galesong yang tidak memiliki kekuasaan atas perahu dan biaya, dalam hal ini bergantung sepenuhnya kepada para individu-individu pengusaha telur ikan terbang, ditambah sistem kerja yang sangat memberatkan *patorani*, bukan berarti harga meningkat, pendapatan mereka juga meningkat. Kenyataannya masih banyak *patorani* yang sulit maju secara ekonomi meskipun telur ikan yang mereka hasilkan begitu berharga di pasaran dunia.

Tulisan Wenifrida membahas tentang mekanisme kerja *patorani* di Desa Pa'lalakkang, Kecamatan Galesong Utara,¹⁹ yang dimuat dalam *Jurnal Agriculture Sciences* pada 2017 lalu banyak menjelaskan banyak mengenai struktur kerja dalam mencari telur ikan terbang. Adapun proses kerjanya begitu berpedoman pada kebudayaan lokal berbentuk ritual-ritual adat, sejak masa persiapan hingga setelah pulang dari melaut. Pada bagian pembahasan, penulis memulainya dengan



Talitha Wenifrida, “Proses Kerja Masyarakat Nelayan: Studi Kasus *Patorani* Di Desa Pa'lalakkang Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan”, *Journal Agriculture Sciences*, Vol. 5 No. 1 hlm. 1-15.

mengulas sejarah penangkapan ikan terbang oleh orang-orang Galesong. Namun, dalam menjelaskannya, masih banyak informasi yang belum mengikutsertakan sumber secara lugas, sehingga masih ada keraguan dalam penjelasannya. Penulis juga belum menyinggung masalah sistem kerja yang terbangun dalam perburuan dan perdagangan telur ikan terbang di Galesong.

Karya lain berasal dari salah satu guru besar di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, Tadjuddin Maknun. Tulisan yang berjudul Nelayan Makassar: Kepercayaan, Karakter, telah diterbitkan oleh Penerbit Identitas Universitas Hasanuddin tahun 2012. Tulisan yang secara umum membahas adat istiadat (kebiasaan) dan kepercayaan-kepercayaan tradisional yang dimiliki oleh nelayan Makassar. Sebelum berlayar, nelayan Makassar mesti mempersiapkan segala kebutuhan yang disertai dengan ritual-ritual tertentu. Hari yang digunakan tidak sembarang, karena dipercaya bisa mempengaruhi produktivitas hasil tangkapan. Ketika berada di laut nelayan juga mesti taat pada segala larangan-larangan tertentu jika ingin menghindari malapetaka. Tulisan ini merupakan karya antropologi.

Penulis juga membuat satu bagian pembahasan mengenai ikan terbang (*juku torani*). Pada bagian tersebut penulis mengulas awal mula nelayan menangkap ikan terbang, bukan telurnya. Dijelaskan bahwa awal mula dinamakan ikan terbang ikan tersebut ditangkap oleh pasukan (*to barani*) Karaeng Galesong. Mereka mengumpulkannya di sekitar Selat Makassar untuk perbekalan berlayar ke Banten



Galesong telah ditaklukan oleh Belanda pada abad 17. *Torani*—istilah Makassar untuk ikan terbang—berasal dari kata *to barani*. Penjelasannya

tidak sampai membahas tentang pencarian telur ikan terbang. Takjuddin Maknun juga berpendapat bahwa masyarakat Galesong sangat kental sistem kekeluargaannya di bidang pekerjaan. Bagi mereka bekerja dengan sanak keluarga lebih mudah terbangun rasa saling percaya, menghormati, dan saling menjaga martabat yang berlandaskan *siri' na pacce*.²⁰ Akan tetapi dalam konteks perburuan telur ikan terbang, landasan kekeluargaan tidak selamanya menjadi acuan untuk merekrut tenaga kerja atau boleh dibilang sifatnya sangat opsional. Pasalnya, tenaga kerja dalam perburuan telur ikan terbang dapat berasal dari kalangan mana saja, jika tidak ada lagi dari sanak keluarganya.

Karya Muhammad Dalvi Mustafa dan Andi Andri Arief berjudul *Kajian Struktur Sosial Kelompok Nelayan Ikan Terbang di Kabupaten Takalar (Studi Kasus Desa Bontomarannu Kecamatan Galesong Selatan)*²¹ membahas soal bentuk kehidupan sosial nelayan telur ikan terbang dalam hal ini *pinggawa* dan sawi beserta hak dan kewajibannya. Penelitian ini dilakukan di Desa Bontomaranu, Kecamatan Galesong Selatan. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa dalam aktivitas mencari telur ikan terbang, peran dominan dimiliki oleh *pinggawa*. Dominasi *pinggawa* atas *sawi* ini tidak hanya terjadi di laut, tetapi juga kegiatan-kegiatan di darat yang tidak berkaitan dengan pencarian telur ikan. Hubungan *pinggawa-sawi* menyebabkan perangkap kemiskinan yang berkepanjangan bagi



²⁰Tadjuddin Maknun, *Nelayan Makassar: Kepercayaan, Karakter, dan Identitas*, (2012), hlm. 24 – 25.

Muhammad D. Mustafa dan Andi Andri A., “Kajian Struktur Sosial Kelompok Nelayan Ikan Terbang di Kabupaten Takalar (Studi Kasus Desa Bontomarannu Kecamatan Galesong Selatan)”, *Jurnal Perikanan dan Kelautan*, Vol. 1. (2017), hlm. 71-81.

para *sawi*. Kedua penulis tersebut terlalu cepat menyimpulkan kondisi sosial yang menyebabkan kemiskinan untuk para *sawi*, adalah akibat hubungan *pinggawa-sawi*. Dalam konteks perdagangan telur ikan terbang ini, bukan hanya memperlihatkan hubungan kerja antara *pinggawa* dan *sawi* saja, tetapi ada kekuatan-kekuatan lain di luarnya yang memiliki pertalian erat dengan *pinggawa* maupun *sawi*.

Kajian-kajian di atas tidak lepas dari disiplin ilmu masing-masing pengkaji. Hal itulah yang mempengaruhi masalah dan tujuan yang dirumuskan. Hanya saja, tidak cukup mampu memberi gambaran sistem kerja yang memiliki kelas-kelas yang kompleks dalam aktivitas tersebut. Tidak bisa dipungkiri kemudian sistem itu merembes dalam kehidupan sehari-hari nelayan, bukan hanya ketika mencari telur ikan terbang. Memang nelayan di Galesong memiliki cerita historis yang erat kaitannya dengan ikan terbang yang konon mulanya ditangkap oleh pasukan Karaeng Galesong pada abad 17. Namun, kenyataannya ketika telur ikan terbang menjadi barang ekspor, ceritanya berbeda.

Kajian ini fokus melihat sejarah *patorani* Galesong yang mulai bekerja menangkap telur ikan terbang, terutama pada sistem kerja yang membuat mereka bisa bertahan. Melihat aspek kausalitas kehidupan *patorani* Galesong selama tiga puluh tahun awal perdagangan telur ikan terbang dengan sistem kerja yang ada, siapa yang dapat maju secara ekonomi dan siapa yang tidak. Kajian sejarah tentang hal ini hampir tidak ditemukan, dan kajian yang fokus pada masalah tersebut juga



ngat minim didapati.

1.6.2. Landasan Konseptual

Secara umum perubahan sosial dipahami sebagai fenomena berubahnya tatanan dalam masyarakat yang meliputi pola pikir, sikap, perilaku, struktur sosial, dan lain sebagainya. Namun, pengertian ini tidak cukup dijadikan sandaran untuk dapat memahami fenomena perubahan sosial suatu masyarakat secara spesifik dan komprehensif. Olehnya, pemotretan konsepsi dengan penekanan elemen-elemen seperti penyebab, proses, dan dampak dari perubahan sosial, serta cara merawatnya supaya dapat bertahan sangat diperlukan. Dari Peter Burke kemudian diperoleh dua model terkait perubahan sosial, yang menampilkan model Herbert Spencer dan Karl Marx.²²

Perubahan sosial ala Spencer hanya menekankan bahwa perubahan sosial ditentukan dari dalam masyarakat itu sendiri. Perubahan pada suatu masyarakat di daerah tertentu tidak memiliki kaitan dengan daerah lain, tetapi perkembangan di berbagai daerah terjadi secara sejajar (paralel), karena perkembangan dilihatnya sebagai evolusi sehingga menganggap bahwa perubahan pasti terjadi dalam setiap masyarakat. Itulah kenapa Spencer tidak begitu peduli terhadap bagaimana proses perubahan tersebut terjadi dan bisa bertahan.²³

Berbeda dengan Spencer, Marx lebih menekankan untuk memperhitungkan juga hubungan masyarakat satu wilayah dengan yang ada di wilayah lain dan berujung pada perubahan. Paling penting lagi dalam perubahan sosial model Marx



Peter Burke, *Sejarah dan Teori Sosial*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2015), hlm. 213.

Ibid., hlm. 213 – 214.

adalah kepedulian melihat mekanisme sistem yang didesain (direncanakan) secara sengaja sekaligus membuatnya bertahan dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.²⁴ Bagi Marx, misalnya, sistem yang membuat pertentangan kaum buruh dan pemilik modal terus menjadi fenomena nyata dalam masyarakat karena dilandasi oleh kerja yang dipaksakan. Hanya dengan memaksakan kerja dalam menghasilkan komoditi, kapital dan kontras kelas dapat bertahan. Karenanya, komoditi di sini bukan sekadar barang yang diperjualbelikan, tetapi dilihat sebagai hubungan sosial.²⁵

Dari kedua model penjelasan perubahan sosial di atas, model Marx yang relevan dan komprehensif dengan penelitian ini, yang terkait dengan sistem yang membuat *patorani* terus-terusan bergantung pada fasilitas pinjaman sumber daya dari *papalele* dan eksportir. Perubahan fokus *patorani* dari ikan terbang ke telur ikan terbang juga ditentukan oleh perusahaan Jepang yang kemudian melakukan kerja sama dengan Indonesia untuk komersialisasi telur ikan terbang pada 1969. Jadi, bukan karena *patorani* Galesong mendapat bisikan hati kemudian langsung menangkap telur ikan terbang seperti alur berpikir Spencer yang “evolusi” itu, melainkan karena adanya kebutuhan konsumsi dari masyarakat Jepang. *Patorani* Galesong juga memiliki kebutuhan materi yang harus dipenuhi, sehingga telur ikan terbang seperti yang dilihat Marx menjadi elemen terjadinya hubungan sosial. Maka

²⁴ *Ibid.*, hlm. 229 – 230.

Hilmar Farid, “Masalah Kelas dalam Ilmu Sosial di Indonesia”, Desember [tp://hilmarfarid.id/masalah-kelas-dalam-ilmu-sosial-di-indonesia/](http://hilmarfarid.id/masalah-kelas-dalam-ilmu-sosial-di-indonesia/). Versi tulisan ini dimuat dalam Vedi Hadiz dan Daniel Dakhidae (ed.), *Ilmu n Kekuasaan di Indonesia*, Equinox Publishing Indonesia, 2006. Diakses Desember 2024.



dinamika masyarakat, khususnya *patorani* Galesong dipengaruhi juga oleh dinamika dari masyarakat di daerah lain.

1.7. Metode Penelitian

Studi sejarah ini mengulas tentang perubahan dan sistem sosial-ekonomi yang menyelimuti aktivitas *patorani* Galesong dalam mengumpulkan telur ikan terbang sejak tahun 1969 sampai 2002. Dalam penyusunan kajian ini, saya mengutamakan sumber-sumber tulisan sezaman. Sumber-sumber sezaman yang saya gunakan antara lain: Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar tahun 1979 – 2003, Badan Pusat Statistik Kecamatan Galesong Selatan 1995 – 2003, Badan Pusat Statistik Kecamatan Galesong Utara 1995-2003 tahun 1979 – 2003, Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan tahun 1970 – 2003, Badan Pusat Statistik Kota Madya Ujung Pandang 1983 yang diperoleh dari website resmi Badan Pusat Statistik; surat kabar, seperti Analisa, Berita Yudha, Bisnis Indonesia, Harian Fajar, Harian Neraca, Jawa Pos, Pedoman Rakyat, Suara Karya, dan Waspada, dari tahun 1977 – 1995; surat-surat keputusan Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun 1979 dan 1983; dan katalog berbahasa Belanda yang disusun oleh J. Tideman mengenai peralatan perikanan asal Takalar tahun 1909 yang diperoleh melalui <https://www.delpher.nl/>; serta gambar-gambar pendukung terkait Galesong yang diperoleh melalui website KITLV, <https://www.kitlv.nl>.

Saya juga menggunakan buku P. J. Kooreman yang berisi tentang pengamatannya terhadap sosio-kultural masyarakat Makassar saat dirinya berada di

Selatan, khususnya di Takalar, bersamaan ketika ia bertugas sebagai Kelas 1 Pegawai Pemerintahan Dalam Negeri untuk Wilayah Kekuasaan



di Luar Jawa dan Madura. Buku ini pertama kali terbit dalam bahasa Belanda oleh *De Indische Gids* pada 1883. Buku yang saya gunakan adalah hasil terjemahan ke dalam bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh BPNB (Badan Pelestarian Nilai Budaya) Sulawesi Selatan pada 2019. Meskipun secara temporal tulisan Kooreman terlampau jauh dengan periode kajian ini, tetapi paling tidak dari tulisan tersebut diperoleh gambaran terkait keharian masyarakat Makassar di masa kolonialisme yang menjadi akar terjadinya berbagai perubahan sosial yang laten pada tahun-tahun berikutnya.

Satu karya disertasi dengan objek yang sama juga yang saya gunakan sebagai sumber untuk kajian. Disertasi ini berasal dari disiplin ilmu perikanan yang disusun oleh Syafrudin Sihotang dalam kurun 1998 sampai 2004. Meskipun berbeda secara disiplin ilmu dan metodologis, tetapi ada beberapa informasi yang dapat dijadikan acuan, terutama mengenai situasi tahun akhir 1990-an sampai awal 2000-an. Pada masa itu, penyusun disertasi ini juga melakukan wawancara langsung terhadap *patorani* di Galesong. Namun, saya harus mengakui terdapat kontradiksi dalam tulisan disertasi ini ketika saya membacanya, dan juga ada beberapa ketidaksepakatan saya terhadap argumennya.

Saya sendiri juga melakukan penelusuran sumber secara lisan melalui wawancara untuk memperoleh informasi secara langsung terhadap *patorani* di Galesong, utamanya mengenai sistem kerja yang ada tumbuh pada kegiatan mereka berburu dan menjual telur ikan terbang. Narasumber yang saya wawancarai adalah

ing yang menjadi *patorani* sejak tahun 1970-an, 1980-an, dan 1990-an.



patorani yang sejak tahun 1970-an dan 1980-an tersebut, saat ini sudah tidak lagi pergi berburu telur ikan terbang.

Tidak hanya *patorani*, saya juga mewawancarai pihak yang pada tahun 1980-an menjadi *papalele*, bahkan pada 1990-an menjadi seorang eksportir telur ikan terbang ke Jepang. Meski tahun 1980-an ia menjadi *papalele*, tetapi sudah sejak tahun 1971 ini membantu mertuanya mengumpulkan telur ikan terbang dari *patorani* di Galesong. Secara keseluruhan, narasumber yang terlibat langsung dalam perdagangan telur ikan terbang yang saya wawancarai berjumlah sepuluh orang, ditambah satu narasumber seorang jurnalis yang pernah meliput langsung di Galesong terkait sistem yang menyelimuti kegiatan aktivitas *patorani* dalam berburu telur ikan terbang pada tahun 1980. Hasil liputan tersebut kemudian dimuat dalam surat kabar.

Ketika saya melakukan wawancara, para narasumber selalu semangat dalam memberikan keterangan. Salah satu dari mereka bahwa meluangkan waktu untuk bercerita dari selesai waktu magrib sampai pukul 23.00 WITA. Hanya saja, masalah terbesar saya ketika di lapangan ialah tidak menguasai bahasa Makassar, yang merupakan bahasa yang paling lancar mereka gunakan. Hanya sedikit kata-kata bahasa Makassar yang saya ketahui.

Sementara, ada satu narasumber yang saya temui benar-benar hanya bisa menggunakan bahasa Makassar, tidak lancar menggunakan bahasa Indonesia.

Untuk mengatasi masalah tersebut, saya memanggil seorang teman yang lancar



a Makassar untuk menemani proses wawancara saya, hingga proses hasil wawancara. Narasumber lainnya masih bisa bertutur dalam bahasa

Indonesia, tetapi terkadang masih ada kesalahpahaman dalam menangkap pertanyaan saya. Saya pun demikian, terkadang butuh waktu atau saya harus mengulang-ulang pertanyaan demi bisa memahami maksud dari penjelasan mereka. Satu tantangan yang harus saya akui juga adalah para narasumber tidak lagi ingat tahun-tahun spesifiknya mengenai pengalaman mereka. Oleh karenanya, dalam tulisan ini tahun-tahunnya peristiwanya juga tidak selalu spesifik.

1.8. Sistematika Penulisan

Tulisan ini secara garis besar terdiri atas lima bagian. Bagian-bagian tersebut dijabarkan secara ringkas di bawah untuk memudahkan pembaca mengenali struktur penulisan dari kajian ini.

Bab 1, memuat latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2, mengulas geografi wilayah dan sistem sosial maupun ekonomi masyarakat Galesong secara umum. Fokus utamanya lebih pada bagaimana kondisi geografi wilayah Galesong mengkondisikan masyarakatnya memilih bekerja sebagai nelayan. Selain itu, sistem sosio-kultural masyarakat Galesong yang beretnis Makassar juga mendapat tempat pada bab ini. Kasus yang disorot salah satunya, dan paling penting, ialah fenomena pelapisan sosial dalam masyarakat Makassar yang pada saat bersamaan menampilkan lapisan bawah menjadikan orang-orang dari kalangan atas sebagai yang diikuti karena alasan ‘keamanan’

ara sosial dan ekonomi.



Bab 3, memuat penjelasan mengenai beralihnya fokus *patorani* Galesong dari menangkap ikan terbang ke telur ikan terbang. Penjualan telur ikan terbang juga akan dibahas pada bab ini, sebagai gambaran betapa berharganya komoditas tersebut di pasaran global, sekaligus salah satu komoditas yang menyumbang devisa terbesar bagi Sulawesi Selatan.

Bab 4, memuat anomali dari penjelasan bab 3. Tingginya nilai komoditas telur ikan terbang di pasar ekspor, ternyata manfaatnya tidak maksimal pada kalangan *patorani* yang pergi mencarinya di lautan. Mereka inilah yang statusnya tidak lebih hanya sebagai buruh yang bergantung pada fasilitas pinjaman dari pihak lain. Karenanya, sorotan pada bab ini adalah sistem kerja yang dialami *patorani* Galesong. Utamanya mengenai bagaimana mekanisme sistem kerja ini didesain sehingga dapat terus bertahan.

Bab 5, kesimpulan atas temuan-temuan dari masalah yang dirumuskan.



BAB II

FAKTOR PENDUKUNG SISTEM SOSIAL-EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN GALESONG

Bagaimana kondisi geografis tempat tinggal masyarakat Galesong? Bagaimana geografis tersebut menjadi bagian dari pembentukan sistem kerja sosial dan ekonomi dalam masyarakat Galesong? Pada bab ini saya mulai dengan membahas gambaran geografis yang pada dasarnya menjadi salah satu unsur penting yang mempengaruhi masyarakat Galesong memilih bekerja sebagai nelayan. Aspek geografis di sini menjadi penting dalam melihat suatu masyarakat bergerak menentukan arah kehidupan sosial dan ekonominya. Bekerja sebagai nelayan, misalnya, tidak sekadar karena kebetulan tempat tinggal mereka dekat dengan laut, tetapi faktor pentingnya adalah kondisi geografis yang cocok bagi mereka untuk mengakses laut secara intensif.

2.1. Relasi Geografis dalam Pembentukan Sistem Sosial-Ekonomi Masyarakat Galesong

Masyarakat Galesong—yang mayoritas beretnis Makassar—saat ini tersebar di tiga wilayah kecamatan, yaitu Galesong Selatan, Galesong, dan Galesong Utara. Wilayah administratif ini berurutan membentang dari selatan ke utara di sebelah barat Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Ketiga kecamatan ini hampir terpisahkan dengan induk wilayah luas Kabupaten Takalar oleh wilayah kabupaten tetangganya, Gowa. Jaraknya dari ibukota kabupaten, ang, sekitar 10 kilometer, jika dihitung dari Galesong Selatan. Sementara ur dari Galesong Utara, jaraknya kurang lebih 22 kilometer.



Galesong Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sanrobone (Takalar) dan Bontonompo Selatan (Gowa) di bagian selatan; di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bontonompo Selatan; di sebelah utara dengan Kecamatan Galesong; dan di sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar. Kemudian Galesong sebelah selatannya berbatasan dengan Galesong Selatan; bagian timur berbatasan dengan Bontonompo dan Bajeng Barat (Gowa); sebelah utara berbatasan dengan Galesong Utara; dan bagian barat berbatasan dengan Selat Makassar. Galesong Utara sendiri berbatasan dengan Galesong di sebelah selatan; di sebelah timur berbatasan dengan Bajeng Barat, Barombong (Gowa), dan Tamalate (Makassar); dan di sebelah timur berbatasan dengan Tamalate (Makassar).

Dalam catatan statistik 1978, luas wilayah Galesong sekitar 57 kilometer persegi.²⁶ Kemudian pada 1983 pemerintah menetapkan wilayah yang kini terbagi atas tiga kecamatan tersebut memiliki luas 65,75 kilometer persegi (6.575 hektare).²⁷ Sampai pada tahun 2023 luasnya masih tetap sama jika merujuk pada data statistik pemerintah daerah setempat.²⁸ Dulunya, Galesong Utara, Galesong

²⁶*Takalar Dalam Angka 1978*, (Takalar: Sensus dan Statistik Kabupaten Daerah Tingkat II Takalar, 1979), hlm. 7. Lihat juga *Takalar Dalam Angka 1979*, (Takalar: Sensus dan Statistik Kabupaten Daerah Tingkat II Takalar, 1980), hlm. 12; *Takalar Dalam Angka 1981*, (Takalar: Kantor Statistik Kabupaten Takalar, 1982), hlm. 1; *Takalar Dalam Angka 1982*, (Takalar: Kantor Statistik Kabupaten Takalar, 1983), hlm. 2.

²⁷Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Tingkat I Sulawesi Selatan Tanggal 9 Maret 1983 No. 124/III/1983 tentang Penetapan Luas Provinsi, Kabupaten/Kotamadya, dan Kecamatan Provinsi Sulawesi Selatan dalam Surat Kepala Kantor Agraria Takalar kepada Para Kepala Wilayah Kecamatan dalam Daerah Tingkat II Takalar Tahun 1983. Koleksi Dinas Kearsipan dan Arsip Sulawesi Selatan, *Inventaris Arsip Statis Pemerintah Daerah* No. 190.

²⁸*Takalar Dalam Angka 2023*, (Takalar: Badan Pusat Statistik Kabupaten 2023), hlm. 8.



Selatan, dan Galesong masih tergabung dalam satu kecamatan, yakni Kecamatan Galesong. Pada Februari 1960, Takalar berdiri sebagai kabupaten sendiri setelah lepas dari Kabupaten Jeneponto-Takalar. Setelah lepas, Pattallassang ditetapkan sebagai ibukota Takalar. Kemudian, berdasarkan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan Tenggara bulan 20 Februari 1960, Takalar ditetapkan memiliki tiga kecamatan administratif, yaitu, Polombangkeng, Galesong, dan Totallasa (Topejawa, Takalar, Laikang, dan Sanrobone).

Dua tahun kemudian, kecamatan tersebut mengalami pemekaran sehingga terbentuk Polombangkeng Utara, Polombangkeng Selatan, Galesong Utara, Galesong Selatan, dan Totallasa. Tidak berhenti sampai di situ, pada 1964, Totallasa dibagi menjadi dua kecamatan, yakni Mappakasunggu dan Mangarabombang, sehingga Takalar memiliki enam kecamatan. Nanti di tahun 2007 baru Galesong diresmikan lagi menjadi kecamatan sendiri, sebagai pemekaran dari Galesong Utara dan Galesong Selatan.²⁹

Galesong Utara dan Galesong Selatan masing-masing terdiri atas enam desa sampai pada tahun 1987. Desa-desa tersebut antara lain: Pa'rasangang Beru, Bontosunggu, Bontolebang, Tamalate, Bontolanra, dan Aeng Batu-Batu (Galesong Utara); Bontomarannu, Bonto Kassi, Bonto Kanang, Bonto Mangape, Bonto LoE, dan Galesong Kota (Galesong Selatan). Pada tahun 1988, pemerintah daerah



Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tanggal 27 April a kecamatan baru dibentuk di Kabupaten Takalar. Kedua kecamatan adalah Sanrobone (pemekaran dari Mappakasunggu) dan Galesong an dari Galesong Selatan dan Galesong Utara). *Kabupaten Takalar Dalam* 08, (Takalar: Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar, 2008), hlm. xi.

mencanangkan penambahan desa-desa di tiap kecamatan di Kabupaten Takalar.³⁰

Di Galesong Utara terdapat tiga desa persiapan sebagai desa baru, yaitu Pa'lalakkang, Tamasaju, dan Pakkabba. Sedangkan di Galesong Selatan terdapat lima desa, yaitu Barammamase, Sawakung, Bentang, Parangmata, dan Boddia.

Tahun 1990, desa persiapan di Galesong Selatan bertambah satu lagi, yakni Parambambe.³¹ Pemekaran masih berlanjut, di tahun 1993, Galesong Selatan memiliki dua desa persiapan lagi, Mangindara dan Galesong Baru. Sejak itu, sampai pada tahun 2005, Galesong Selatan terdiri atas empat belas desa. Pada 2006 bertambah lagi tiga desa, sehingga totalnya adalah tujuh belas desa. Sementara Galesong Utara terus bertahan dengan sembilan desa sampai pada tahun tersebut.

Ketika terbentuk Kecamatan Galesong pada tahun 2007, desa-desa di Galesong Selatan dan Galesong Utara kembali mengalami perubahan jumlah. Rinciannya kemudian, Galesong Utara terdiri atas enam desa dan satu kelurahan, Galesong sebelas desa, dan Galesong Selatan delapan desa. Pa'rasangang Beru dan Pa'lalakkang adalah dua desa dari Galesong Utara yang kemudian menjadi bagian dari Galesong. Sementara desa-desa dari Galesong Selatan yang menjadi bagian dari Galesong, yaitu Galesong Baru, Galesong Kota, Boddia, Parangmata, Parambambe, Bonto LoE, Bontomangape, Kalenna Bontomangape, dan Pattinoang.



³⁰Penambahan ini sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 682/V/1988 yang isinya kurang lebih rencana lima belas desa persiapan dan lima desa defenitif, dalam *Dalam* '88, (Takalar: Kantor Statistik Kabupaten Takalar, 1989), hlm. xxx. *Dalam Angka 1990*, (Takalar: Kantor Statistik Kabupaten Takalar, 1991),

2.1.1. Topografi Wilayah dan Keadaan Iklim

Pada kolom salah satu surat kabar tahun 1993, termuat catatan tentang Galesong yang dijuluki sebagai ‘negeri dolar’. Hal ini karena Galesong menjadi penghasil perikanan laut terbesar di Sulawesi Selatan. Galesong memang merupakan daerah yang memiliki pantai, dan ada begitu banyak nelayan di daerah ini yang lokasi melautnya bahkan sampai di daerah Papua. Namun, karena banyak pula desa di Galesong yang jauh dari pesisir sehingga tidak semua penduduk memusatkan perhatian pada laut. Penduduk yang memusatkan perhatian pada laut rata-rata tinggal di desa-desa berpantai.

Sebelum terjadi pemekaran pada 1988, desa-desa yang memiliki pantai adalah Aeng Batu-Batu, Tamalate, Bontolebang, Bontosunggu, Parasangang Beru, Galesong Kota, Bonto LoE, Bonto Kassi, dan Bontomarannu. Sedangkan desa-desa yang tidak berpantai, yaitu Bontolanra, Bontomangape, dan Bontokanang. Pada kurun tahun 1988 sampai 1993, desa-desa yang memiliki pantai adalah Aeng Batu-Batu, Tamalate, Bontolebang, Tamasaju, Bontosunggu, Pa’lalakkang, Galesong Kota, Boddia, Bonto LoE, Bontokanang, Barammamase, dan Bontomarannu.

Pada kurun tahun 1993 sampai 2002 (batasan temporal kajian ini) desa yang memiliki pantai bertambah dua, yakni Mangindara dan Galesong Baru. Pemekaran ini pada gilirannya mempengaruhi keadaan desa-desa di kawasan tersebut, misalnya desa yang tadinya memiliki banyak nelayan akhirnya tinggal sedikit. Baik perikanan atau pertanian, keduanya didukung oleh topografi wilayahnya.



Permukaan wilayah Galesong (Selatan dan Utara) cenderung datar atau hampir datar. Hampir tidak terdapat bukit atau gunung. Ini seperti yang ditunjukkan oleh

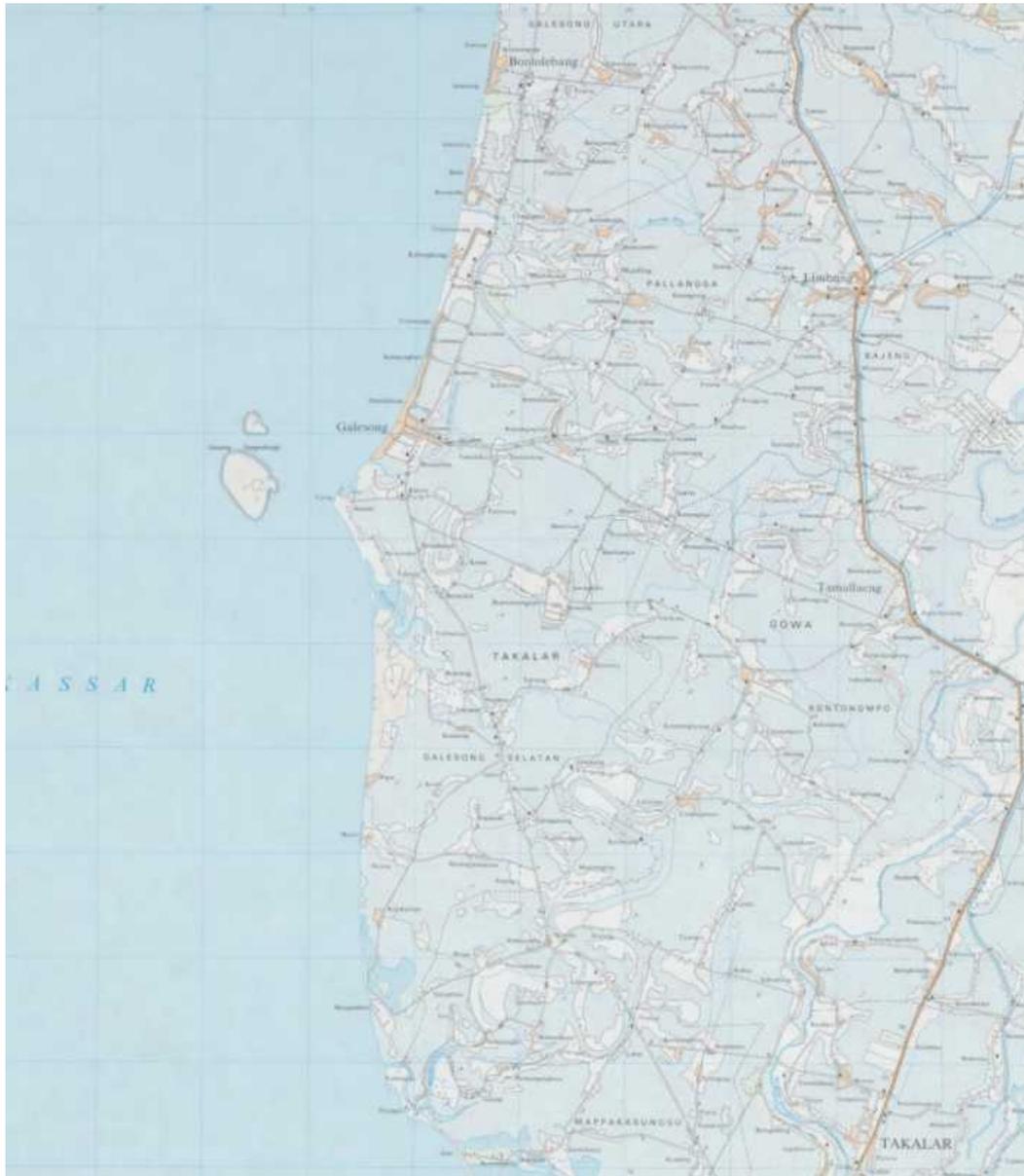
peta 2.1. bahwa tidak ada tanda-tanda kontur yang menunjukkan bukit di daerah tersebut. Peta ini dibuat pada tahun 1981 sampai 1982 dalam program Pemetaan Dasar Nasional yang dilaksanakan Perum Survai Udara Penas. Hasil gambar lapangan tersebut kemudian disunting pada 1989, kemudian diterbitkan oleh Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal). Selain itu, dari gambaran topografi wilayah Galesong dengan tahun lebih lama (1914 – 1916) seperti pada Peta 2.2. dan Peta 2.3. juga menunjukkan bahwa tidak terdapat bukit-bukit pada wilayah tersebut. Ketinggian daratan Galesong tidak sampai lima puluh meter dari atas permukaan laut.³²

Galesong memiliki tanah berjenis *alluvial*, yaitu berwarna coklat kelabu dengan tekstur liat dan berpasir.³³ Tanah tersebut terbentuk dari endapan material yang dibawa oleh aliran sungai. Dan memang terdapat sungai-sungai kecil yang melintas dan bermuara di Galesong. Sungai-sungai tersebut sejatinya merupakan anak-anak dari Sungai Jeneberang.

³²Kecamatan Galesong Selatan Dalam Angka 1995, (Takalar: Statistik Kecamatan Galesong Selatan, 1996), hlm. 4; Kecamatan Galesong Utara Dalam Angka 2002, (Takalar: Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar, 2003), hlm. 2.

³³Beberapa daerah lain selain Takalar di Sulawesi Selatan yang tanahnya berjenis *alluvial* adalah Barru, Pinrang, Polewali, Sinjai, Palopo, Soppeng, Malili, dan dataran rendah Mamuju. Di Takalar sendiri, khususnya wilayah Galesong Selatan dan Galesong Utara jenis *alluvial*nya berwarna coklat kelabu. Lihat dalam a, dkk., *Geografi Budaya Daerah Sulawesi Selatan*, (Jakarta: Proyek 1 dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1976), hlm. ar Dalam Angka 1994, (Takalar: Statistik Kabupaten Takalar, 1995), hlm.





Peta 2.1. Wilayah Takalar yang digambar secara fotogrametri dari udara pada 1981 – 1982. Sumber: Koleksi KITLV, D K 1,15 dalam Koleksi Digital Perpustakaan Universitas Leiden, <http://hdl.handle.net/1887.1/item:2407225>.

Alluvial termasuk golongan tanah yang subur sehingga cocok dimanfaatkan untuk lahan pertanian (persawahan). Beberapa tanaman yang cocok dengan tanah



adalah padi, kelapa, kapas, dan lain-lain. Pada tahun 1979, lahan an yang tersedia seluas 4.048,73 hektar atau 62 persen dari luas wilayah

Galesong, dengan jumlah petani sebanyak 5.623 orang.³⁴ Para petani Galesong rata-rata menanam padi di lahan-lahan persawahannya. Selain padi, mereka juga menyediakan petak-petak tertentu dari lahan persawahannya untuk menanam jagung, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, hingga sayur-sayuran. Banyaknya jenis tanaman pangan yang dapat tumbuh Galesong menandakan betapa tanahnya cukup subur untuk beberapa tanaman pangan.



Peta 2.2. Topografi wilayah Galesong bagian utara yang dibuat pada tahun 1914-1916 dan diterbitkan pada tahun 1922 oleh Layanan Topografi Perusahaan Reproduksi di Batavia.
Sumber: Koleksi Digital Perpustakaan Universitas Leiden (KITLV, D C 5,1 blad 12 p),
<http://hdl.handle.net/1887.1/item:57943>



Peta 2.3. Topografi wilayah Galesong bagian selatan yang dibuat pada tahun 1915 dan diterbitkan pada tahun 1922 oleh Layanan Topografi Perusahaan Reproduksi di Batavia.
Sumber: Koleksi Digital Perpustakaan Universitas Leiden (KITLV, D C 5,1 blad 4 c) <http://hdl.handle.net/1887.1/item:91479>

Hanya saja praktik pertanian penduduk Galesong pada tahun 1970-an masih mengandalkan sistem tadah hujan. Karena itu, padi yang dihasilkan terdiri atas padi



Takalar Dalam Angka 1979, op.cit, hlm. 2 dan 18.

gadu (ditanam pada penghujung musim hujan) dan padi rendengan (ditanam pada awal musim hujan). Pengairan teknis atau sederhana sebenarnya sudah ada di beberapa desa, tetapi hanya di bagian timur Galesong, yang jauh dari pantai.

Desa-desa di pesisir pantai seperti, Galesong Kota, Galesong Baru, Mangindara, Bonto Kanang dan Pa'lalakang murni bergantung pada air hujan. Bontomarannu, Barammamase, BontoloE, dan Boddia sebenarnya sedikit beruntung karena memiliki pengairan sederhana, akan tetapi yang lebih dominan masih menggunakan sistem tadah hujan.³⁵ Catatan statistik pada tahun 2002 memperlihatkan bahwa keadaan pengairan di desa-desa tersebut masih belum berubah.³⁶ Karena kondisi demikian penduduk di desa-desa ini banyak bekerja sebagai nelayan, bahkan nelayan menjadi prioritas dibanding petani.

Pada dasarnya pekerjaan sebagai nelayan sudah dijalani oleh banyak penduduk Galesong jauh sebelum 1960-an. Setidaknya pengetahuan masa lalu tentang melaut atau pekerjaan sebagai nelayan dalam masyarakat Galesong masih dimiliki oleh para nelayan di era-era selanjutnya. Maka pilihan menjadi nelayan sangat mungkin dilakukan selain hanya memusatkan perhatian pada daratan saja. Terlebih, pantai Galesong sangat mendukung pekerjaan sebagai nelayan atau *patorani*.



³⁵*Kecamatan Galesong Selatan Dalam Angka 1995, op.cit, hlm. 40; Lihat Kecamatan Galesong Utara Dalam Angka 1995, (Takalar: Statistik dan Galesong Selatan, 1996), hlm. 38.*

Kecamatan Galesong Selatan Dalam Angka 2002, (Takalar: Badan Pusat Kabupaten Takalar, 2003), hlm. 51; Kecamatan Galesong Utara Dalam 2002, op. cit. hlm. 45.

Galesong memiliki karakteristik pantai begitu berpasir dan tidak berkarang dengan panjang 23 kilometer lebih. Saking berpasirnya, pada awal dekade 1990-an, Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar mencanangkan pembukaan tambang pasir besi di pesisir Galesong. Untuk merealisasikannya, pemerintah tersebut membuka pintu masuk bagi investor untuk menyalurkan dananya demi terealisasinya kegiatan penambangan tersebut. PT. Parsi (Pasir Besi Indonesia) adalah satu perusahaan yang mengolah pasir Galesong dan kemudian mulai beroperasi pada tahun 1993.³⁷ Tidak hanya itu, bahkan pasir-pasir di sebelah barat pantai Galesong juga diambil untuk pelaksanaan proyek reklamasi *Centre Point of Indonesia* (CPI) di sebelah barat Pantai Losari (Makassar) sejak 2016 lalu.

Khusus desa-desa berpantai dan memiliki banyak *patorani*, seperti Tamalate, Pa'lalakang, Galesong Kota, Galesong Baru, Boddia, Barammamase, Bontomarannu, dan Mangindara, pola permukiman penduduknya mirip-mirip, cenderung di kawasan pesisir pantai. Di sebelah timur rumah-rumah penduduk terhampar petak-petak sawah.

Rumah terdekat dengan air laut berjarak sekitar lima puluh meter lebih. Hal ini menandakan bahwa kondisi pantai kala itu sangat aman dijadikan permukiman penduduk di Galesong. Kalau sekarang ini, boleh dibilang penduduk terutama yang tinggal di dekat pantai cenderung waspada sebab air laut sedikit lagi menyentuh



³⁷PT. Pasir Besi Indonesia (Parsi) ini bekerja sama dengan Wuhan Iron & Steel Corp. (perusahaan asal China yang mengolah pasir besi). Kerja sama ini kemudian memiliki nama PT. Abadi Djojo Iron & Steel Corp. Perusahaan ini diinvestasi sekitar 60 dolar Amerika atau sekitar Rp. 100 miliar. Lihat artikel: "Menggantung Harapan di Pasir Besi Galesong", *Pedoman Rakyat*, No. 315, hlm. 7.

rumah-rumah penduduk. Bahkan ada yang sudah memindahkan rumah tinggalnya akibat abrasi pantai.



Gambar 2.1. Dari Pantai Galesong terlihat pohon-pohon kelapa menjulang tinggi. Perahu-perahu bercadik nelayan berjajar rapi di depan rumah penduduk.
Sumber: Foto ini diambil oleh Mahmud Hading yang dimuat dalam surat kabar Pedoman Rakyat, 23 Januari 1994.

Di kawasan pantai nampak banyak pohon kelapa menjulang tinggi di antara rumah-rumah penduduk yang juga berdiri di dekat pantai. Selain kelapa, bambu juga banyak tumbuh di sekitar perdesaan Galesong. Sumber daya itulah (daun kelapa dan bambu yang kemudian dimanfaatkan para nelayan, khususnya *patorani*, untuk merakit alat penangkapan yang disebut *pakkaja* atau *balla-balla*, alat tangkap ikan terbang atau telur ikan terbang. Kendati demikian, pengambilan bahan tersebut tidak hanya dari Galesong mengingat banyaknya kebutuhan *patorani* akan daun terutama pada saat penggunaan alatnya telah bergeser pada *balla-balla*.





Gambar 2.2. Di perkampungan penduduk di Galesong terdapat banyak pohon kelapa merkipun belum terlalu tinggi.
Sumber: Foto ini juga diambil oleh Mahmud Hading yang dimuat dalam surat kabar Pedoman Rakyat, 23 Januari 1994.

Selain alat tangkap, bahkan banyak penduduk terutama nelayan membangun rumah dengan bahan bambu, baik tiang, dinding, maupun kerangka lainnya. Catatan tahun 1978 setidaknya memperlihatkan ada sebanyak 2.742 rumah bambu, 7.192 rumah kayu, dan hanya 229 buah rumah batu di Galesong.³⁸ Salah seorang penduduk asal Desa Pa'lalakang, Kecamatan Galesong, Sampar Dg. Taba juga menjelaskan:

...kalau dulu, dulu dicerita, bambu dulu, baru kayu-kayu biasa atau jati lah, baru kayu ulin, dipindah kayu ulin, rumah batumi. Rumah panggung bambu to. Tiangnya bambu, baru dipindah tiangnya jati, baru dipindah lagi kayunya ulin. Barusan ini rumah batu. Saya orang tuaku dulu itu saya ingat rumah bambu dulu tiangnya, tiang bambu, semuanya bambu, kalau atapnya,



Takalar Dalam Angka 1978, op. cit., hlm. 21.

atapnya eeh, nipah, rumbia. Beli dari Maros. [...] Banyak dulu di sini pohon-pohon, bambu banyak.³⁹

Agaknya pemilihan bambu begitu memungkinkan mengingat lebih mudah didapatkan dan secara ekonomis mudah terjangkau dibanding menggunakan kayu yang harus didatangkan dari luar Galesong. Atapnya sendiri menggunakan daun rumbia atau nipah yang didatangkan dari Maros.

Sebelah barat pantai terdapat pulau-pulau kecil, diantaranya adalah Pulau Sanrobengi, Tanakeke, dan pulau-pulau kecil lainnya. Keberadaan pulau-pulau tersebut menjadi penghalang ombak laut yang keras menghantam kawasan pantai Galesong, yang pada gilirannya penduduk dapat beraktivitas dengan nyaman di kawasan tersebut. Posisi Galesong tidak berbeda jauh dengan Makassar—sebagai pelabuhan besar sejak abad ke-16—yang diuntungkan berkat gugusan pulau-pulau kecil di sebelah baratnya sehingga kapal atau perahu dapat menepi dengan aman.

Perahu yang digunakan oleh para nelayan di Galesong saat itu berbahan kayu dari pohon yang ada di lingkungan sekitar, salah satunya adalah pohon mangga. Pohon mangga banyak juga tumbuh di Galesong kala itu. Sampar Dg Taba menjelaskan sebagai berikut:

Kayu kapal sekarang ini dari ianu dari Sinjai. [...] Dulu di sini belie e anu kayu di sini dibikin. [...] Apa namanya, kayu pude. Apa namanya itu, kayu orang Bugis itu kayu bitti. Kalau di sini anu apa seng, katole, kalau orang Bugis, bitti. [...] Dipake untuk kapal. Tapi dulu bukanji kayu begitu, pohon manggaji. Paling dulunya pohon manggaji dulu. Ee itu saya masih anu itu masih ingat itu, pohon mangga itu. [...] Banyak, tapi banyak juga dibeli. Bukan kita yang punya sendiri tapi disini lagi, bukanji di Sinjai dibeli. Di sinilah, di daerah Takalar.⁴⁰



Wawancara Sampar Daeng Taba, Pa'lalakang, Galesong Utara, Takalar, Selatan, 1 Juni 2024.

Wawancara Sampar Daeng Taba.

Meskipun ada banyak pohon mangga, tetapi ketersediaanya masih belum cukup untuk sekian banyaknya perahu yang hendak dibikin. Olehnya, masyarakat harus mendatangkan kayu itu dari daerah lain. Daerah tersebut masih dalam wilayah Takalar. Belakangan baru nelayan mulai mengambil dari daerah luar Takalar, salah satunya dari Sinjai. Itupun kayunya bukan lagi mangga, melainkan kayu pude, bitti, dan lain-lain.

Pada tahun 1978 saja tercatat jumlah perahu di Galesong Utara ada 1.367 buah dan di Galesong Selatan 1.098 buah.⁴¹ Perahu-perahu ini terdiri atas perahu motor (angkutan laut) dan layar yang meliputi, *pajala*, *patorani*, *balolang*, dan *lepa-lepa*. Pada tahun 2002, jumlah perahu sudah melebihi angka dua ribu pada masing-masing kedua kecamatan tersebut. Di Galesong Utara 2.310 dan Galesong Selatan 2.199 buah perahu.⁴² Jumlah perahu di Mangarabombang dan Mappakasunggu—dua kecamatan lainnya di Takalar yang wilayahnya juga bersentuhan langsung dengan perairan Selat Makassar serta secara geografis wilayah cenderung sama dengan Galesong—terpaut jauh dengan yang ada di Galesong.

Jika jumlah perahu semacam itu, maka nelayan pun demikian. Keberadaan nelayan di Takalar bahkan paling banyak ditemukan di Galesong. Menurut data yang ada dari tahun 1978 sampai 2002, jumlah nelayan di Galesong jauh mengungguli banyaknya nelayan di dua kecamatan lainnya yang sama-sama memiliki pantai, Mappakasunggu dan Mangarabombang. Terlepas dari itu, yang



Sensus dan Statistik Kabupaten Daerah Tingkat II Takalar, *Takalar Dalam '78*, *op. cit.* hlm. 54.

Statistik Kabupaten Takalar, *Takalar Dalam Angka 2002*, (Takalar: Badan Statistik Kabupaten Takalar, 2003), hlm. 140.

ingin saya sampaikan adalah bahwa kondisi pantai sangat menentukan gerak para penduduk memilih bekerja sebagai nelayan atau bukan. Pantai Galesong begitu memadai sebagai gerbang dalam mengakses laut secara intensif, baik sebagai nelayan (*patorani*) atau lainnya.

Tidak hanya pantai, perairan Selat Makassar yang begitu dekat dengan permukiman mereka menyediakan banyak sumber daya laut terutama berbagai jenis ikan. Pada tahun 1975, misalnya, ikan-ikan yang ditangkap para nelayan setempat antara lain: ikan kembung, katamba, teri, hiu, ikan terbang, bambangan, mayung, lacukang, dan lain-lain. Selain ikan, ada pula teripang, kerang-kerangan, ekor ikan hiu, udang laut, cumi-cumi, kulit penyu, dan tiram.⁴³ Dari data statistik Kabupaten Takalar tahun 1979 juga menunjukkan ikan-ikan serupa yang ditangkap oleh nelayan Galesong, dengan menyebutkan beberapa jenis ikan lainnya lagi, seperti ikan peperek, kurisi, gulama, cucut, pari, layang, selar, kuwe, belanak, cakalang, dan masih banyak lagi.⁴⁴ Rincinan ini memperlihatkan betapa perairan tersebut memiliki kekayaan sumber daya yang dapat dimanfaatkan sebagai pemasukan ekonomi masyarakat setempat.

Pada dasarnya akses untuk bekerja sebagai petani atau pun nelayan tidak sulit karena keadaan kontur wilayahnya cenderung datar. Terdapat pula jalan raya utama Galesong yang terkategori sebagai jalan kabupaten yang mempermudah proses terjadinya interaksi sosial dan ekonomi penduduk. Namun, pada tahun 1981, permukaan jalan raya tersebut masih sedikit yang beraspal. Itupun hanya di



Mattulada, dkk, *op.cit*, hlm. 55 – 56.
Takalar Dalam Angka 1979, op. cit., hlm. 69.

Galesong Utara, yaitu sepanjang empat kilometer. Di Galesong Selatan belum ada sama sekali, nanti pada tahun berikutnya baru ada.

Pemukaan jalan yang dominan adalah tanah dan kerikil, terutama jalan-jalan yang ada di desa-desa. Dengan panjang jalan keseluruhan yang ada kurang lebih 158 kilometer, hanya dua puluh persen yang permukaannya cukup baik, delapan puluh persen kondisinya rusak (ringan maupun berat).⁴⁵ Pada tahun 1986, jalanan beraspal sudah mencapai panjang tiga puluh kilometer, dan di tahun 1994 panjangnya lima puluh kilometer lebih. Namun, permukaan jalanan dalam desa belum sama sekali menggunakan aspal, beton, ataupun kerikil sampai pada tahun tersebut, seluruhnya masih tanah.⁴⁶

Dari segi iklim, wilayah Galesong sama seperti Sulawesi Selatan atau wilayah-wilayah di Indonesia pada umumnya, memiliki iklim tropis dengan dua musim, yakni kemarau dan hujan. Musim kemarau terjadi pada bulan April hingga September. Sedangkan musim hujan terjadi pada Oktober hingga Maret. Pada musim kemarau, kecepatan angin paling tinggi terjadi di bulan September, sekitar 6 mil/jam.⁴⁷

Sepanjang bulan April hingga September, keadaan ombak di perairan Selat Makassar masih cukup tenang. Memasuki musim hujan, ombak laut begitu ganas, angin kencang, terutama di bagian selatan Sulawesi Selatan menuju ke timur. Sepanjang periode 1970-an hingga 2000-an awal curah hujan tertinggi di Galesong



Data Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar dalam *Takalar Dalam* '86, (Takalar: Kantor Statistik Kabupaten Takalar, 1987), hlm. 64.

Takalar Dalam Angka 1994, *op. cit.*, hlm. 235.

Berdasarkan data dari stasiun cuaca Mandai tahun 1975. Lihat dalam a, dkk., *op. cit.*, hlm. 9 – 10.

terjadi pada bulan Desember dan Januari. Pada musim ini menjadi kesempatan bagi para petani untuk menanam padi atau lainnya bagi yang bergantung sepenuhnya pada air hujan.

Sebagian nelayan yang memiliki tanah (lahan) pun beralih menjadi petani, dan sebagian lagi memilih beristirahat atau tetap lanjut melaut mencari ikan, seperti para *patorani*. Dengan perahu yang masih menggunakan layar sehingga sistem angin di sini benar-benar penting. Maka, nelayan pergi melaut ketika angin sedang stabil—ombak pun demikian—yang diamati dan diperkirakan berdasarkan pada pengetahuan-pengetahuan astronomi tradisional.

2.1.2. Jarak antara Permukiman Nelayan dengan Pusat-pusat Keramaian

Jarak permukiman penduduk Galesong yang bekerja sebagai *patorani* dengan pusat-pusat keramaian sangat penting posisinya dalam proses analisis mengapa kemudian penduduk memilih pekerjaan tersebut. Pasalnya, kemudahan akses atau sebaliknya akan mempengaruhi pilihan-pilihan Bergeraknya masyarakat, misalnya, penduduk yang tinggal di desa-desa pantai di Galesong, berfokus pada laut atau daratan. Sebelum melangkah jauh, perlu ditegaskan bahwa pusat keramaian di sini tertuju pada tempat-tempat terjadinya proses interaksi ekonomi dan sosial secara masif dan ramai. Pada periode kajian ini, tempat-tempat tersebut teridentifikasi berada di Bontolebang dan Galesong Kota (pusat Galesong Utara dan Galesong Selatan), Pattallassang (pusat Kabupaten Takalar), Sungguminasa (pusat Kabupaten Gowa), dan Kota Ujung Pandang.



nya mulai dari Pa'lalakang, desa yang memiliki banyak *patorani*.
ng memiliki wilayah seluas 1,74 kilometer persegi. Jaraknya ke ibukota

kecamatan, Bontolebang, sekitar 6 kilometer. Kalau ke ibukota Kabupaten Takalar, Pattallasang, jarak yang harus dilalui untuk bisa sampai kira-kira 20 kilometer.⁴⁸ Sementara kalau ke Kota Ujung Pandang jaraknya 25 kilometer dan ke Sungguminasa jarak tempuhnya hampir 19 kilometer.⁴⁹ Perlu ditegaskan di sini bahwa titik perhitungan jarak ibukota provinsi tersebut mengambil patokan kawasan pelabuhan atau yang kini berada di Jalan Nusantara dan sekitarnya, mengingat karena kawasan tersebut merupakan bagian dari pusat keramaian yang intensif di Ujung Pandang. Ini juga berlaku pada penjelasan desa-desa selanjutnya.

Beralih ke Galesong Selatan, Popo dan Mangindara, dua desa yang mulanya bagian dari Bontomarannu sampai akhir dekade 1980-an atau awal 1990-an. Mangindara lepas dari Bontomarannu pada tahun 1993. Sedangkan Popo sendiri yang sejak tahun 1970 merupakan salah satu dusun di Bontomarannu, akhirnya bergabung dengan Barammamase—desa (baru) pemekaran dari Bontomarannu—pada tahun 1987. Nanti tahun 2006 baru Popo berstatus sebagai desa. Keadaan ini membuat Barammamase kehilangan wilayah pantainya. Nasibnya sama dengan Parasangang Beru setelah Pa'lalakang tidak lagi menjadi bagian dari wilayahnya.

Bontomarannu memiliki luas 3,95 kilometer persegi. Penduduk Bontomarannu banyak yang bermukim di dekat pantai. Barammamase dan Mangindara dengan masing-masing luas 4,43 kilometer persegi dan 1,05 kilometer persegi pun demikian. Jarak Bontomarannu ke ibukota kecamatan, Galesong Kota, kurang lebih 11 kilometer, ke pusat kabupaten 19 kilometer, dan ke Ujung Pandang



Kecamatan Galesong Utara Dalam Angka 1995, Op. cit., hlm. 5.
Hasil perkiraan perhitungan melalui Google Maps.

sejauh 34 kilometer.⁵⁰ Sementara dari pusat permukiman penduduk lainnya seperti di wilayah yang kemudian menjadi Desa Mangindara, jaraknya ke pusat kecamatan kira-kira 12 kilometer. Jarak ke pusat kabupaten sekitar 20 kilometer, ke Sungguminasa 30 kilometer, dan ke Ujung Pandang 35 kilometer lebih. Barammamase sendiri jaraknya ke pusat kecamatan sejauh 8 kilometer, ke pusat kabupaten 14 kilometer, ke Ujung Pandang 31 kilometer, dan ke Sungguminasa 27 kilometer.

Terakhir, Galesong Kota, Boddia, dan Galesong Baru, dengan luas desa masing-masing 1,27 kilometer persegi, 3,57 kilometer persegi, dan 1,72 kilometer persegi. Dari Galesong Baru ke pusat kabupaten jaraknya 21 kilometer, dari Galesong Kota 19 kilometer, dan dari Boddia 18 kilometer. Sementara ke Ujung Pandang jaraknya 27 kilometer dan ke Sungguminasa 20 kilometer. Ketiga desa ini awalnya satu, yakni Desa Galesong Kota, dan merupakan pusat kecamatan di Galesong Selatan.

Pasar umum sebagai salah satu ruang keramaian dalam kegiatan transaksi ekonomi dan sosial tidak tersedia di semua desa yang memiliki *patorani*. Begitu juga pelelangan ikan. Pada tahun 1995, desa yang memiliki pasar dan pelelangan ikan hanya Bontomarannu, Galesong Kota, dan Tamalate. Pasar dan pelelangan tersebut sejatinya sudah ada di tahun 1970-an.

Pada era tersebut Pa'lalakang sebenarnya memiliki satu pelelangan ikan.

Dari Surat Keputusan Pemerintah Daerah Tingkat II Takalar No: 94/Kpts/1979



Penunjukan Kepala Pasar dan Pelelangan Ikan dalam Kabupaten Daerah

Takalar Dalam Angka 1986, Op. cit., hlm. 170.

Tingkat II Takalar terdapat catatan tentang satu pelelangan ikan bernama Lelang Kampong Beru. Kampong Beru (Kampung Beru) merupakan satu tempat di Pa'lalakang, yang sekarang ini telah menjadi desa sendiri sebagai pemekaran dari Pa'lalakang.⁵¹ Dg. Taba juga memberi penjelasan yang sama bahwa dulu pelelangan ikan pernah di Pa'lalakang, tetapi kemudian dipindahkan ke Pantai Beba (Tamasaju)⁵² yang jaraknya sekitar 5 kilometer lebih dari desa tersebut. Sejak itu Pa'lalakang kemudian tidak lagi menjadi desa yang sifatnya dikunjungi secara intensif.

Pada intinya, keberadaan pasar dan pelelangan ikan dapat mempengaruhi banyak orang dari berbagai desa untuk datang. Mereka-mereka datang untuk mencari kebutuhan hidup Dan pada saat yang sama keadaan tersebut membuka peluang bagi penduduk baik dari dalam desa maupun dari desa-desa tetangga untuk memilih pekerjaan lebih majemuk.

Pa'lalakang yang tidak memiliki pasar umum, tidak ada warung-warung, ketika hendak membeli kebutuhan sehari-hari, mereka akan pergi ke pasar umum yang ada di Galesong Kota. Jaraknya kira-kira hanya dua kilometer lebih dari permukiman penduduk. Galesong Kota sebagai pusat kecamatan, memiliki pasar, pelalangan ikan, dan dilintasi jalan raya besar membuatnya menjadi tempat yang sangat begitu ramai di wilayah Galesong, dari Selatan ke Utara. Galesong Kota



Surat Keputusan Pemerintah Daerah Tingkat II Takalar No: 94/Kpts/1979
Penunjukan Kepala Pasar dan Pelelangan Ikan dalam Kabupaten Daerah
I Takalar.

Wawancara Sampar Daeng Taba.

menjadi tempat paling ramai pada tahun era 1970-an dan 1980-an dibanding desa-desa lain.⁵³

Bontomarannu sendiri sekalipun ada satu pasar umum (Pasar Balang) dan pelelangan ikan (Lelang Kalukubodo), tetapi penduduknya yang bekerja pada sektor perdagangan hanya tiga puluhan. Penduduk Barammase hanya dua puluhan dan Mangindara tidak sampai dua puluh orang yang bekerja sebagai pedagang. Pasar Balang tersebut memiliki jarak sekitar tiga kilometer dari tempat tinggal penduduk Mangindara yang terjauh, sedangkan dari Barammase jaraknya sekitar dua kilometer.

Pasar umum juga terdapat di Desa Bonto Mangape, Bonto Kassi, Bonto Loe, Bontosunggu, Bonto Lanra, dan Pakkabba. Kalau dari Mangindara ke Bonto Kassi mesti menempuh jarak sekitar lima kilometer lebih agar bisa sampai, ke Bonto Mangape hampir dua belas kilometer, ke Bonto Loe delapan kilometer lebih, dan ke Pakkabba dan Bonto Lanra lebih dari dua puluh kilometer. Ada juga satu pasar dibagian timur Mangindara yang berjarak empat kilometer lebih. Pasar tersebut bernama Pasar Bontoramba yang masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Gowa.

Pa'lalakang sendiri kalau ke Bontosunggu sangat dekat karena keduanya berbatasan secara wilayah. Kira-kira dari pusat permukiman masing-masing hanya berjarak satu kilometer. Kecuali, dari Pa'lalakang ke Bontomangape jaraknya sekitar tujuh kilometer, ke Bonto Lanra dan Pakkaba sekitar sepuluh kilometer, ke

...ssi sembilan kilometer, ke Bonto Loe lima kilometer, dan ke Bontosunggu



Wawancara Sampar Dg. Taba.

dan Bontoramba sekitar dua belas kilometer. Sementara dari Popo ke Bonto Mangape berjarak delapan kilometer, ke Bonto Kassi sekitar 4 kilometer, ke Bonto Lanra dan Pakkabba delapan belas kilometer, dan ke Bontoramba hampir enam kilometer.

Kemudian ada di antara desa-desa tersebut yang wilayahnya dilintasi jalan raya utama, seperti Galesong Kota, Galesong Baru, Boddia, Barammamase, Tamalate, dan Pa'lalakang. Wilayah Popo sendiri sekalipun masuk dalam kawasan Barammamase, tetapi sebagai dusun atau kemudian menjadi desa sendiri berjarak kurang dari satu kilometer dari jalan raya utama. Sementara Mangindara dan Bontomarannu memang tidak dilintasi jalan raya utama Galesong. Dari wilayah Bontomarannu paling timur jarak ke jalan raya utama sekitar dua kilometer lebih. Namun, jika patokannya adalah rumah-rumah penduduk, maka jaraknya bisa lebih dari lima kilometer. Mangindara pun demikian, berjarak hampir tiga sampai enam kilometer dari jalan raya utama, baik melalui Desa Bontoramba ataupun Bontomarannu dan Barammamase.

Posisi desa yang jauh dari tempat-tempat keramaian seperti pusat kecamatan, kabupaten dan kota, dan pasar-pasar mempengaruhi pola sosial dan ekonomi suatu masyarakat di desa-desa tersebut. Penduduk di Pa'lalakang, Mangindara, dan Popo harus keluar ke desa-desa lain jika hendak mencari pekerjaan lain, selain nelayan dan petani karena kedua ini yang paling dekat.

Namun, sebenarnya keragaman jenis pekerjaan penduduk di desa-desa tersebut beda jauh, nelayan, petani, pedagang, pengrajin, buruh, jasa pemerintahan. memang jumlahnya sangat berbeda signifikan, seperti Galesong Kota



(bersama Galesong Baru dan Boddia) dan sangat dominan jumlah penduduknya memilih di sektor perdagangan. Tamalate juga mengalami hal yang sama, sangat banyak jumlah pedagangnya di lingkup Galesong Utara. Namun, pada periode 1970-an hingga 2000-an, nelayan dan petani menjadi pekerjaan paling banyak dijalani oleh masyarakat Galesong.

2.2. Sistem Sosial Masyarakat Galesong

Berbicara masalah sistem sosial dalam kehidupan nelayan Galesong kira-kira dapat diawali dengan melihat sistem sosial yang terbangun dalam masyarakat tersebut secara umum. Galesong adalah salah satu wilayah persebaran penduduk etnis Makassar. Dalam masyarakat Makassar masa kerajaan terdapat kelas-kelas sosial yang begitu ketat dan didasarkan pada garis darah keturunan. Hal ini begitu penting dalam masyarakat Makassar, karena kelas sosial akan menentukan siapa yang harus menduduki posisi di pemerintahan dari yang paling tinggi hingga ke tingkat paling kecil.

Tidak hanya pada sektor pemerintahan, tetapi juga menentukan pihak-pihak yang akan berperan sebagai pekerja. Kelas sosial tertinggi seperti bangsawan Makassar memiliki kekuatan yang besar, baik secara politik, sosial, maupun ekonomi, daripada rakyat biasa. Dalam situasi ini kemudian memungkinkan rakyat biasa mencari perlindungan kepada bangsawan-bangsawan tinggi demi kesejahteraan hidup secara sosial dan ekonomi. Bangsawan kemudian memiliki sejumlah pengikut, dan semakin banyak pengikutnya menunjukkan pula besarnya

dari seorang bangsawan. Dari hal itu bisa terlihat bahwa sebenarnya



hubungan keduanya begitu saling membutuhkan demi kepentingan masing-masing (patron-klien).⁵⁴

Perlu ditekankan bahwa hubungan sosial tersebut bersifat dinamis. Satu contoh yang bisa dilihat ketika Pemerintah Kolonial Belanda mengatur tata pemerintahan di Sulawesi Selatan pada awal tahun 1900-an, tidak lagi menjadi otoritas tertinggi di wilayahnya. Mereka tetap ditunjuk untuk memimpin wilayah-wilayahnya tetapi begitu dikendalikan oleh pemerintah Belanda. Hal ini akan memungkinkan pula terjadinya pergeseran kehidupan sosial masyarakat Makassar, khususnya yang ada di Galesong.

Dalam bahasan ini akan berfokus pada struktur sosial dalam masyarakat Makassar yang di dalamnya terdapat kelas sosial dan hubungan kerja sama antara tuan dan pengikut (sistem patronase). Hal ini dianggap perlu dalam ini menganalisis sistem kerja sosial yang berlangsung dalam masyarakat Galesong. Pada gilirannya, sistem kerja tersebut akan dikaitkan dengan sistem kerja para nelayan telur ikan terbang (*patorani*).

2.2.1. Kelas Sosial dalam Masyarakat Galesong

Gambaran mengenai penggolongan kelas sosial dalam masyarakat Makassar dapat ditemukan dalam beberapa tulisan yang telah ada sebelumnya. Saya mulai dari tulisan Kooreman yang lahir dari pengamatannya selama menjadi kontrolir di Takalar pada 1800-an. Dalam tulisannya terlihat secara tidak langsung bahwa kelas sosial dalam masyarakat Makassar terdiri atas *ana' karaeng*



Edward L. Poelinggomang, *Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan 1906-1942*, (Yogyakarta: Ombak, 2004), hlm. 51 – 52.

(bangsawan) dan *to maradeka* (orang merdeka), serta *ata* (budak). Pengkategorian tersebut didasarkan pada garis keturunan yang dipegang oleh masyarakat Makassar.

Bangsawan merupakan golongan yang pengaruhnya paling tinggi dalam masyarakat. Mereka memiliki kekuatan yang kuat secara sosial, ekonomi, dan politik, dan perannya dalam kehidupan bermasyarakat biasanya menduduki jabatan pemimpin atau jabatan di pemerintahan. Golongan bangsawan ini secara umum terdiri atas bangsawan pusat dan daerah. Bangsawan pusat menjadi pemimpin dalam lembaga federasi yang terdiri atas daerah-daerah yang dipimpin oleh *karaeng* atau kepalanya masing-masing (bangsawan daerah). Karenanya, bagi Kooreman seorang *karaeng* pusat sebenarnya tidak memiliki kekuasaan wilayah dalam batasan yang jelas, yang ada hanyalah *karaeng-karaeng* yang memimpin daerah-daerah yang tergabung dalam suatu federasi kelembagaan. Daerah-daerah tersebut disebut *bori*. Pemimpin *bori* bergelar *karaeng* atau *galarang*.

Kooreman menjelaskan bahwa ketika masyarakat pribumi dimintai penjelasan mengenai gelar dalam masyarakat Makassar, jawaban yang diberikan adalah kepala daerah yang disebut sebagai *karaeng* atau *arung* memiliki ornamen (pusaka), regalia (pusaka kerajaan). Para kepala daerah yang benar-benar jelas kekuasaan batas wilayahnya dahulu masih mandiri tetapi sekarang mereka harus menjadi pengikut regen. Semua kepala daerah lainnya akan tunduk kepada para *karaeng*.⁵⁵ *Karaeng* yang dimaksud di sini adalah *karaeng* tertinggi (pusat), yang



P. J. Kooreman, *Fakta dan Peristiwa di Wilayah Sulawesi dan Daerahnya*, (Makassar: UPT Unhas Press bekerjasama dengan Balai Pelestarian Laya Sulawesi Selatan, 2019), hlm. 2.

memiliki sebuah pusaka dan dianggap sebagai benda tidak biasa. Karena itu masyarakat Makassar mengikutinya.

Benda pusaka itu awalnya dimiliki oleh seorang yang disebut *to manurung*. Pusaka itu kemudian diwarikan pada keturunan-keturunannya sekaligus tanda pewarisan tahta sebagai *karaeng*. Itulah kenapa golongan bangsawan yang tertinggi di masa Kooreman bertugas disebutnya *ana karaeng* (keturunan dari orang yang dianggap *to manurung* tadi). Namun, pada intinya penentu kedudukan seorang *karaeng* di sini sebenarnya adalah suatu benda, yang begitu dihormati dan disakralkan. Masyarakat Makassar menyebut benda tersebut dengan istilah *kalompoang* dan *gaukung*.⁵⁶

Sebagai bukti yang mendukung argumen tersebut diajukan contoh kasus pada tahun 1865 atau 1866. Muncul persekutuan untuk memberontak pada Raja Gowa. Pemberontakan tersebut dipimpin oleh Galarang Mangasa. Suatu ketika Raja Gowa sedang keluar, pemberontak melancarkan aksinya dengan merebut ornamen kebesaran raja yang saat itu tersimpan di suatu tempat bernama Kindang. Nyaris pemerintahan raja tersebut berakhir, tetapi pada akhirnya berhasil direbut

⁵⁶Sekalipun *Kalompoang* dengan *Gaukung* sama-sama benda, tetapi kedudukannya dipandang berbeda dalam masyarakat Makassar. *Kalompoang* berasal dari kata *lompo* yang dalam bahasa Makassar berarti ‘besar’. Dalam konteks kelembagaan atau kerajaan, *kalompoang* didefinisikan sebagai tanda-tanda kebesaran. Dalam bahasa Bugis diistilahkan dengan *arajang*. Jadi tanda-tanda tersebut dapat berupa pusaka kerajaan. *Gaukung* pun sejatinya adalah benda-benda, untuknya unik-unik, dapat berupa batu, buah, patung, patung kecil, bendera, lain. *Gaukung* berasal dari kata *gau* yang artinya dalam bahasa Makassar idakan. Lokasi ditemukannya benda tersebut akan dibangun permukiman. cat dulu percaya bahwa *gaukung* tersebut yang memberi perintah kepada ung untuk melakukan suatu hal. Baca dalam *Ibid.*, hlm. 6 – 7.



kembali. Pemimpin Gowa tersebut memperoleh kembali kekuasaannya. Dari kasus yang dialami oleh Kooreman sendiri pada tahun 1876 saat bertugas sebagai Asisten Residen Distrik Selatan, regent atau Karaeng Bantaeng meninggal, ornamennya disimpan di tempat Kooreman. Seketika itu masyarakat menunjukkan sikap hormatnya pada Kooreman, yang sebelumnya tidak terjadi padanya. Semua perintah Kooreman dipatuhi oleh masyarakat yang sebelumnya dipimpin oleh Karaeng Bantaeng.⁵⁷

Dari kasus ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sejatinya kelas sosial dan pengaruh yang menyeratai seorang bangsawan tidak lepas dari ornamen-ornamen seperti *kalompoang* atau *gaukang* yang begitu dihormati oleh masyarakat Makassar. Seandainya bukan karena ornamen dapat dipastikan bahwa status kebangsawanan tidak berarti sama sekali dalam konteks perkembangan di abad ke 19 tersebut. Pada saat yang sama golongan atas juga tidak memiliki pengaruh untuk membentuk pengikut-pengikutnya. Pada bagian awal tulisannya, Kooreman menggambarkan seseorang menjadi *ata kalompoang* karena telah menyerahkan diri untuk mengabdikan pada *kolompoang*. Ketika seseorang sudah mengabdikan diri pada *kalompoang*, tuan-tuan mereka sebelumnya tidak berhak lagi atas dirinya. Itu berarti *kalompoang* lebih tinggi posisinya ketimbang seorang tuan. Kalau *kalompoang* itu ada pada tuan tersebut, maka orang-orang akan mengikutinya. Saya kira inti yang penting di sini adalah status seseorang membutuhkan perangkat berbentuk materil untuk memantapkan kedudukannya dalam suatu masyarakat.



Ibid., hlm. 15 – 16.

Kelompok bangsawan yang berasal dari *to manurung* (bangsawan pusat) pada perkembangannya terbagi lagi atas beberapa jenjang. Polinggomang dengan menggunakan hasil penelitian Friedericy dan Mattulada menjelaskan dasar terbaginya golongan ini karena hubungan perkawinan sehingga mempengaruhi darah kebangsawanan dalam tubuh masyarakat Makassar. Jenjang bangsawan tersebut terdiri atas *ana' tino*, *ana' cera*, *ana' karaeng sala*, dan *ana' sipuwe*.

Hal ini berlaku pada bangsawan pusat yang identik dengan benda bernama *kalompoang*. Sementara bangsawan daerah identik dengan *gaukang*, dan keturunan penemunya di sebut *ana' karaeng maraengannya* (bangsawan yang lainnya).⁵⁸ Dari keempat bagian tersebut, *ana' tino* yang dianggap sebagai bangsawan murni karena ayah dan ibunya keturunan bangsawan murni. *Ana' tino* ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu *ana' patola* dan *ana' manrapi*. Diantara keduanya, *ana' patola* berhak menduduki tahta kerajaan.⁵⁹

Penjelasan ini pada dasarnya mengambil kasus dalam masyarakat Kerajaan Gowa. Meski demikian, tidak ada perbedaan signifikan mengenai pembagian kelas sosial dalam masyarakat Makassar di kerajaan lain, terutama yang ada *to manurungnya*. Lalu bagaimana dengan masyarakat Galesong? Pada dasarnya, Galesong merupakan tempat persebaran orang Makassar yang dulunya sebagai wilayah kekuasaan Kerajaan Gowa. Putra sulung Sultan Hasanuddin, I Mannidori Daeng Tojeng (Karaeng Galesong I) diangkat sebagai *karaeng* lokal di daerah



Edward L. Poelinggomang, *op. cit.*, hlm. 66 – 67.

Mengenai perbedaan golongan bangsawan ini, lihat *Ibid.*, hlm. 66. Lihat Kooreman, *op. cit.*, hlm. 26.

tersebut. Dari dasar itulah dapat ditarik kesimpulan bahwa kelas sosial dalam masyarakat Galesong tidak berbeda dengan penjelasan di atas.

Bersambung pada penjelasan mengenai *ana' manrapi* dan lainnya, kira-kira dapat dilihat dari tulisan Maknun. Penjelasan Maknun sebenarnya berasal dari sumber serupa dengan yang digunakan oleh Polinggomang. Keduanya sama-sama menggunakan karya dari Mattulada.

Ana' manrapi selaku bangsawan murni dapat berkesempatan menjadi raja jika putera mahkota dipastikan tidak dapat menduduki jabatan sebagai raja. Sedangkan, *ana sipuwe*, *ana' cera*, dan *ana' karaeng sala* memiliki darah bangsawan yang tidak utuh. Artinya semuanya merupakan keturunan dasar dari raja. Rinciannya kira-kira begini. *Ana' sipuwe* adalah keturunan raja, tetapi ibunya berasal dari golongan *tu' maradeka* atau *ata'*. *Ana' cera*, yaitu keturunan bangsawan darah sebagai hasil perkawinan dari *ana' tino* atau *ana' sipuwe* dengan golongan *ata'*. Sementara *ana' karaeng sala* merupakan keturunan dari hasil pernikahan antara *ana' sipuwe* atau *ana' cera* dengan golongan *tu' maradeka* atau *ata'*.⁶⁰

Kelas selanjutnya di bawah bangsawan adalah *tumaradeka*. Kelas ini meliputi orang-orang kaya atau terpandang dalam masyarakat yang disebut *tubaji'* dan orang-orang biasa yang disebut *tu' samara*⁶¹. Ketiga, golongan *ata'*, yang terdiri atas *ata sossorang*, *ata nibuang*, dan *ata tumangngirang* atau *ata tumangempoang*. *Ata' sossorang* dianggap sebagai hamba karena keturunan dari nenek moyangnya.



Tajuddin Maknun, *Nelayan Makassar: Kepercayaan, Karakter, dan Identitas*, 2012), hlm. 22.

Tu' masara terdiri atas dua kata, tau dan samara. Tau artinya orang atau sedangkan samara berarti umum atau biasa. Jadi tau masara atau tu masara orang-orang biasa. Lihat dalam P. J. Kooreman, *op. cit.*, hlm. 28.

Ata' nibuang, yaitu orang-orang yang menjadi hamba karena melakukan suatu kesalahan besar. Dan *ata' tumanggirang* menjadi hamba karena tidak dapat melunasi hutang-hutangnya. Namun, golongan ini bisa saja menjadi *tumaradeka* jika hutangnya telah lunas.⁶²

Kalau diperhatikan, penggolongan tersebut sebenarnya bersifat dinamis sebagai hasil konstruksi sosial masyarakat Makassar. Bisa dilihat di atas, khususnya dua kelas di bawah bangsawan, *tu'maradeka* dan *ata'*, keduanya sewaktu-waktu berpotensi dalam bergantian menempati kelas-kelas tersebut. Dari penjelasan Maknun dan juga tulisan Kooreman, diperlihatkan bahwa terbentuknya kelas *ata'* terjadi karena ada pelanggaran aturan atau kesalahan yang mereka perbuat, sehingga mereka harus mengabdikan kepada golongan bangsawan sebagai hukumannya atau kepada pemberi hutang karena tidak mampu membayar hutang-hutangnya.

Apabila pelanggaran tersebut tidak dibuat maka mereka bisa keluar dari kelas *ata'*. Boleh jadi juga kelas *ata' sossorang* nenek moyangnya melakukan kesalahan sehingga mendapat hukuman menjadi budak. Karena dapat dipastikan bahwa nenek moyangnya tersebut tidak mungkin sejak dari kandungan sudah ditetapkan garisnya bernasib sebagai *ata'*, kecuali seorang bangsawan yang sejak dalam kandungan sudah dipastikan bahwa ia akan terlahir sebagai bangsawan.

Mungkin karena hal itulah juga dasar kesimpulan dari analisis Friedericy yang kemudian dipakai oleh Polinggomang mengenai kelas sosial dalam :at Makassar yang membaginya hanya dua, yakni *ana' karaeng* dan



Ibid., hlm. 23.

tu'maradeka. Ada dua kemungkinan dasar kesimpulan ini: pertama, karena budak dipandang sebagai suatu hukuman sehingga kurang sesuai sebagai kelas sosial yang disandingkan dengan *ana' karaeng* dan *tu'maradeka*, dan kedua, karena pada masa kedatangannya sebagai kontrolir di Sulawesi Selatan pada awal abad 20 sistem perbudakan sudah dihapuskan. Namun, saya kira secara praktik perbudakan masih berlangsung dibawah kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda. Praktik tersebut diistilahkan dengan kerja rodi. Lain hal dengan pengamatan Kooreman, yang menemukan masih berlangsungnya sistem perbudakan dalam masyarakat Makassar melalui vonis akibat pelanggaran yang telah dilakukan.

Perlu untuk dilihat bagaimana mekanisme kelas sosial tersebut berlangsung dalam masyarakat Makassar. Di sini saya akan tetap mempertimbangkan konteks periode yang berlangsung. Pada masa sebelum Pemerintah Belanda benar-benar terlibat dalam mengatur keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat Makassar, bangsawan menjalankan perannya sebagai pemimpin di berbagai wilayah masyarakat Makassar. Untuk menjadi pemimpin harus benar-benar sosok berdarah bangsawan murni. Semakin tinggi kemurnian darah bangsawannya, semakin besar hak-hak istimewa yang dimilikinya. Besar potensinya menjadi pemimpin, atau paling tidak memiliki kekebalan hukum. Artinya, mereka akan kuat secara ekonomi juga. Sementara masyarakat kelas bawah syarat terkena hukuman untuk mengabdikan pada kalangan bangsawan ketika berbuat kesalahan. Status kebangsawanan terus dijaga, dan untuk menjamin keberlangsungannya, jalan yang diambil adalah

catan perkawinan.⁶³

Edwar L. Polinggomang, *op. cit.*, hlm. 68.



Dalam masyarakat Makassar dulu terdapat ketetapan bahwa orang-orang yang memiliki kedudukan yang sama atau dari segi darah keturunan sejajar, hampir sama sekali tidak memiliki kewenangan terhadap sesamanya. Bangsawan yang tinggi memiliki kewenangan terhadap bangsawan rendah, apalagi yang bukan bangsawan. Bangsawan rendah tidak sama sekali memiliki kewenangan dan kekuasaan terhadap bangsawan tinggi. Namun, dalam menyelesaikan persoalan dalam wilayah terutama setingkat lembaga *gaukang*, tidak secara langsung dibawah ke tingkat tertinggi. Kerajaan Gowa, misalnya, memiliki banyak lembaga *gaukang* di bawahnya, dan pada kenyataannya masih menjadi wilayah yang mandiri, salah satunya adalah Galesong. Artinya kelembagaan *gaukang* tersebut tetap memiliki otoritas untuk mengatur sistem di wilayahnya tanpa campur tangan dari pusat.

Pada periode tersebut masyarakat Makassar masih berupaya mempertahankan fenomena lapisan sosial. Biasanya dilakukan oleh golongan bangsawan demi memastikan legitimasi posisinya sebagai yang tertinggi dan memiliki bawahan yang dapat menjadi pengikutnya. Hubungan tersebut patut dipertahankan untuk dapat menjadi pemimpin. Di samping itu, para bangsawan memiliki kedudukan yang kebal hukum, sementara masyarakat bawah rentan dikenai hukuman. Oleh karenanya, masyarakat bawah mencari perlindungan dari seorang bangsawan demi menjamin kedudukannya posisinya. Pengikut bangsawan ini dikenal dengan sebutan *ana-ana*.

Sekalipun konteksnya sudah masuk campur tangan Belanda, Galesong tetap meski tergabung sebagai *Onderafdeling* Takalar yang dibawah nen Makassar. Dalam Galesong pun memiliki lembaga-lembang yang



mandiri, yakni Bontomangape, Bentang, Popo, Barangmamase, Kaluku, dan Galesong. Hal ini menjadi berarti bahwa sistem tradisional lama masih bertahan. Pengaruh perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda tidak benar-benar berhasil mengubah tatanan yang ada. Itu artinya, kontras pelapisan kelas sosial juga masih berlangsung.

Perbudakan masih berlaku lewat peraturan *pipi pipina, battang batanna* yang artinya adalah “apa yang tumbuh adalah milinya, batangnya adalah miliknya, apa yang dimiliki seorang budak adalah hal milik tuannya”. Pegawai pemerintahan kerap diingatkan oleh masyarakat Makassar terutama kalangan kelas atas yang memiliki budak.⁶⁴ Dengan beradaptasi dengan peraturan lama masyarakat Makassar, pemerintah gubernemen kemudian menetapkan sistem kerja rodi, dan yang menjadi sasaran tetap masyarakat kelas bawah atau pengikut-pengikut bangsawan. Peraturan tersebut kira-kira berbunyi seperti ini: selain ada kerja rodi yang harus dilakukan untuk gubernemen, juga ada kerja rodi yang harus dilaksanakan masyarakat untuk para *regent (karaeng)*, kepala, dan kaum bangsawan.⁶⁵

Pada periode ini, pemerintah kolonial memanfaatkan tatanan-tatanan lokal dalam menjalankan sejumlah kebijakannya. Di samping itu pelapisan sosial tetap bertahan karena kedudukan kalangan atas tetap terjaga, mereka tetap memiliki legitimasi sosial, politik, dan ekonomi dalam masyarakat. Pada saat yang sama, ketergantungan kelas bawah terhadap kelas atas terus bertahan.



P.J. Kooreman, *op. cit.*, hlm. 43.
Ibid., hlm. 66.

2.2.2. Perubahan Struktur Sosial Masyarakat Galesong

Pada periode tahun 1950-an dan 1960-an, sistem pengikut dan tuan masih bertahan. Keterangan ini paling tidak bisa dilihat dari penelitian Chabot dan Pelras. Pengamatan Chabot pada dekade 1950-an yang coba dibandingkannya dengan penggambaran Kooreman pada 1880 di atas sampai pada kesimpulan bahwa meskipun terjadi perubahan struktural pemerintahan tetapi tidak ada perubahan berarti dalam fenomena tuan dan pengikut dalam masyarakat Makassar. Para bangsawan hanya kehilangan sebagian besar hak istimewa yang mereka miliki sebelumnya, seperti kepastian menjadi seorang pemimpin masyarakat. Namun pada dasarnya situasi tersebut tidak benar-benar lenyap. Mereka justru tetap berusaha menjaga dan meningkatkan prestise sosial mereka, menjadi pemimpin lokal, dan terutama keberhasilan ekonomi.⁶⁶

Satu contoh bisa dilihat pada 1913, bangsawan Galesong bernama Larigau Daeng Maninruru masih dilantik sebagai Karaeng Galesong oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Meski di sini kendali bangsa kolonial Barat tersebut begitu terlihat, tetapi masyarakat Galesong tetap mengakui kedudukannya.⁶⁷ Pada masa itu Sulawesi Selatan mengalami yang namanya ‘pemerintahan tidak langsung’.⁶⁸

⁶⁶H. Th. Chabot dijelaskan oleh C. Pelras sebagai ilmuwan pertama yang menganalisis hubungan patron-klien di Sulawesi Selatan. Hasil analisis tersebut kemudian diterbitkan pada tahun 1950 dengan judul *Verwanschap, stand en sexe in Zuid-Celebes*. Lihat C. Pelras, “Hubungan Patron-Klien pada Masyarakat Bugis dan Makassar di Sulawesi Selatan”, dalam Roger Tol, dkk., (ed.), *Kuasa dan Usaha rakyat Sulawesi Selatan*, (Makassar: Innawa, 2009), hlm. 37.
⁶⁷Indiana, dkk. “Galesong pada Masa Pemerintahan I Larigau Daeng ruru (1913-1951)” *Patingaloang*, Vol. 4 No. 1 (2017), hlm. 33.
⁶⁸C. Pelras, “Hubungan Patron-Klien pada Masyarakat Bugis dan Makassar si Selatan”, dalam *op.cit*, hlm. 36.



Berlanjut ketika Indonesia sudah lepas dari pengaruh kolonial Belanda, Larigau Daeng Maninruru masih berkendudukan sebagai Karaeng Galesong. Berakhir nanti pada tahun 1951.

Pengganti Daeng Maninruru tetap seorang bangsawan bernama A. J. Bostan Daeng Mamadja, yang sejatinya merupakan keponakan sekaligus anak mantunya. Informasi serupa juga diperoleh dari Daeng Gading. Penjelasannya kira-kira seperti dibawah ini:

*...tahun 60, 90 ampimpingi Galesong punna Pa'lalakkang nikana Karaeng Rapi, punna keseluruhang nikana Karaeng Ma'ja. Tena ku urangi tahun siapa ingka sallomi mimping, tempo Balanda inji. Ka nikana tongi Karaeng Galesong anjo Karaeng Ma'ja.*⁶⁹

“...sejak tahun 60, 90 galesong, bagian pa'lalakkang dipimpin oleh seorang bernama karaeng rapi'. Untuk keseluruhan galesong dipimpin oleh Karaeng Ma'ja tetapi saya tidak mengetahui sejak kapan dia memimpin, tetapi ia telah lama memimpin, telah memimpin sejak masa Belanda. Karaeng Ma'ja juga disebut sebagai Karaeng Galesong.”

Daeng Mamadja terpilih melalui pemilihan yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, petani, nelayan, kepala kampung, *galarang*, *jannang*, *anrong guru*, dan imam-imam kampung. Ia menang dengan perolehan suara sebanyak 85 persen, mengalahkan dua kandidat lainnya, yakni Abd. Kadir Daeng Toto dan Nurung Daeng Tombong, yang masing-masing hanya memperoleh suara sebanyak sepuluh persen dan lima persen.⁷⁰ Paling tidak hal ini menandakan bahwa bangsawan tetap dianggap pantas untuk menduduki jabatan sebagai kepala atau karaeng oleh masyarakat Galesong.



⁶⁹Wawancara I Tuan Daeng Gading, Pa'lalakang, Galesong Utara, Takalar, Selatan, 3 Juni 2024.

H. Aminuddin Salle, dkk., “Aktualisasi Nilai-Nilai Tradisional dalam ipinan Komunitas Lokal: Rekaman Awal Kepemimpinan Elit Lokal Galesong”, *Prosiding Simposium Internasional Jurnal Antropologi 1 I Makassar*, 2000, hlm. 418.

Penelitian Pelras pada 1967, juga memiliki kesimpulan serupa. Sistem kerja semacam itu belum lenyap. Bangsawan lokal tetap berusaha mempertahankan prestise sosialnya demi mendapatkan pengikut. Pelras juga melihat bahwa sistem ini tidak begitu memperhatikan batas pembagian masyarakat secara teritorial. Dalam artian, sistem ini memungkinkan terjadinya mobilitas sosial dari satu tempat ke tempat lain, tergantung di mana seorang tuan membutuhkan mereka.⁷¹ Pada sisi lain, di periode ini status kebangsawanan tidak lagi menjadi patokan yang menduduki jabatan pemimpin. Banyak di sejumlah daerah masyarakat Makassar para pemimpinnya adalah orang-orang pendatang. Hal ini memperlihatkan adanya pergeseran tatanan sosial dalam masyarakat Makassar itu sendiri. Kira-kira akarnya bisa dilacak pada era abad 19 sebagai masa kolonial Belanda benar-benar berperan dalam menciptakan berbagai kebijakan dalam kehidupan sosial masyarakat Makassar, yang kemudian berlanjut pada masa pemerintahan Indonesia yang baru.

Pelaksanaan pemerintahan baru ini memang dibedakan menjadi dua periode. Pertama adalah masa transisi ketika banyak pejabat, baik dipilih atau ditunjuk pada dasarnya masih keturunan bangsawan yang menjadi pemimpin sebelumnya. Pelras memberikan contoh kasus tersebut melalui Wajo. Tiga puluh *wanua* bekas bentukan Belanda digabung menjadi sepuluh kecamatan, dan yang menjadi pemimpinnya sebagian adalah mantan *arung* pada masa sebelumnya.⁷² Terlihat bahwa pada periode ini status kebangsawanan masih begitu dipertimbangkan.



C. Pelras, "Hubungan Patron-Klien pada Masyarakat Bugis dan Makassar
Sulawesi Selatan", dalam *op.cit*, hlm. 29.

Ibid., hlm. 42.

Kalau dibandingkan dengan yang terjadi di Galesong kasusnya persis. Periode kedua setelah transisi, pertimbangan kebangsawanan atau memiliki pengikut tidak lagi menjadi bahan pertimbangan untuk menjadi atau dijadikan sebagai pemimpin. Namun, tantangan dari model tersebut, para pemimpin justru cenderung tidak memiliki pengaruh yang berarti dalam masyarakat, terutama di tingkat-tingkat desa. Pada masa ini komposisi kaum elit telah mengalami perubahan. Bangsawan tetap menjadi golongan elit, tetapi belum tentu menjadi penguasa. Penguasa menjadi golongan elit tersendiri, kemudian ada pegawai negeri dan intelektual. Golongan bangsawan pun dapat menjadi pegawai, intelektual, atau penguasa.⁷³

Masyarakat Makassar masih cenderung menjadikan orang-orang tertentu untuk diikuti (*tu nipinawang*). Hal ini dilakukan untuk mendapat jaminan kesejahteraan hidup, baik secara sosial maupun ekonomi. Orang yang diikuti pada dasarnya berasal dari golongan bangsawan yang memiliki harta kekayaan dan kekuatan politik.⁷⁴ Namun, pegawai, intelektual, dan penguasa tidak bisa menjadi bangsawan, sebab pengukuran bangsawan masih berdasarkan garis darah keturunan.

Pada akhirnya, sistem lama tidak benar-benar hilang. Dalam masyarakat Galesong tuan dan pengikut masih menjadi fenomena yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Misalnya saja dalam kehidupan para nelayan, terlihat dari hubungan



Ibid., hlm. 43.

H. Th. Chabot dijelaskan oleh C. Pelras sebagai ilmuwan pertama yang lisis hubungan patron-klien di Sulawesi Selatan. Hasil analisis tersebut diterbitkan pada tahun 1950 dengan judul *Verwanschap, stand en sexe in ebes*. Baca *Ibid.*, hlm. 24 – 25.

sawi, pinggawa, dan papalele. Para *sawi* cenderung bergantung pada *pinggawa* dan *papalele* yang dapat melindungi dan menjamin kesejahteraan ekonomi mereka. Sewaktu-waktu sebenarnya bisa saja pengikut tersebut mencari tuan lain jika mereka diperlakukan dengan sewenang-wenang. Begitu pun sebaliknya, tuan tidak akan lagi menjadi penjamin kehidupan para bawahannya jika tidak menunjukkan sikap kepatuhan. Namun, pada dasarnya tuan selalu berusaha menjaga hubungan tersebut demi tetap memperoleh kedudukan sosialnya, terutama keterjaminan dan keberhasilan ekonomi.

2.3. Sistem Ekonomi Masyarakat Nelayan Galesong

2.3.1. Bekerja sebagai Nelayan

Cukup banyak penduduk Galesong bekerja sebagai nelayan. Para nelayan tersebut rata-rata memiliki rumah dekat dengan pantai atau tinggal di desa-desa berpantai, seperti Aeng Batu-Batu, Bontolanra, Bontolebang, Bontosunggu, Tamalate, Parasangang Beru, Galesong, BontoloE, Bontokanang, dan Bontomarannu. Namun, pembatasan kesepuluh desa ini hanya berlaku sebelum terjadi pemekaran wilayah pada tahun 1987. Setelah tahun tersebut, Mangindara, Tamasaju, Pa'lalakang, Barammamase, Boddia, dan Galesong Baru juga termasuk sebagai desa yang memiliki nelayan. Namun, terdapat pula penduduk yang bekerja sebagai nelayan berasal dari desa tidak berpantai, salah satunya adalah penduduk di Bontomangape.

Pada tahun 1978, jumlah secara keseluruhan nelayan di Galesong (Utara dan 2.029 orang. Angka ini menjadikan Galesong sebagai tempat yang paling nelayannya dibanding wilayah lain di Takalar. Jumlah nelayan di



Mappakasunggu dan Mangarabombang saja—yang sama memiliki pantai—jika digabungkan tidak mencapai delapan ribu. Meski begitu, kedua daerah tersebut jumlah nelayan daratnya cukup banyak, jauh melebihi nelayan darat di Galesong. Di Mappakasunggu tercatat sebanyak 1.200, Mangarabombang 1.120, sementara Galesong Utara dan Selatan masing-masing hanya delapan puluh dan empat puluh orang nelayan. Nelayan di Galesong terbagi atas nelayan laut, tambak, serta perairan umum.⁷⁵ Paling banyak nelayan tersebut memusatkan perhatian di laut. Rincian angkanya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1. Penduduk Galesong (Selatan dan Utara) yang bekerja sebagai nelayan 1971 - 2002

Tahun	Penduduk Galesong (Jiwa)	Rumah Tangga	Rumah Tangga Perikanan	Nelayan		
				Nelayan Laut (Jiwa)	Nelayan Tambak (Jiwa)	Nelayan Perairan Umum (Jiwa)
1971	52.487	-	-	-	-	-
1978	57.448	10.046	3.491	8.909	120	-
1981	61.654	11.467	3.550	8.935	122	20
1986	64.064	12.931	1.631	8.942	141	30
1991	70.639	14.391	1.908	9.022	152	41
1996	74.887	16.200	2.070	9.370	170	60
2002	83.798	18.469	2.228	10.175	196	63

Sumber: *Sulawesi Selatan Dalam Angka 1971; Takalar Dalam Angka 1978; Takalar Dalam Angka 1981; Takalar Dalam Angka 1986; Takalar Dalam Angka 1991; Takalar Dalam Angka 1996; Takalar Dalam Angka 2002; Kecamatan Galesong Selatan Dalam Angka 1996; Galesong Selatan Dalam Angka 2002; Kecamatan Galesong Utara Dalam Angka 1996; dan Kecamatan Galesong Utara Dalam Angka 2002.*



⁷⁵Nelayan laut adalah nelayan yang pergi ke laut menggunakan perahu rak yang cukup jauh dari daratan untuk mencari ikan, seperti ikan layang, kakap, dan lain sebagainya. Sedangkan nelayan tambak (darat) biasanya kan aktivitas di pesisir pantai dengan membuat tambak untuk budidaya deng dan udang. Nelayan perairan umum beraktivitas mencari ikan di tawa-rawa, dan lain sebagainya.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2002 penduduk Galesong yang bekerja sebagai nelayan telah meningkat sebanyak 1.266 jiwa dari tahun 1978. Ini bukan saja karena pertambahan jumlah penduduk pada rentang tahun tersebut, melainkan karena akses pilihan pekerjaan lain sangat berjarak dengan keterampilan dan pengetahuan yang mereka miliki. Pengetahuan dan keterampilan tersebut sejatinya merupakan pewarisan dari orang tua mereka yang sebelumnya juga bekerja sebagai nelayan. Dalam kurun tahun tersebut, nelayan laut menjadi yang dominan dijalani penduduk Galesong.

Nelayan bukan satu-satunya pekerjaan utama penduduk Galesong. Banyak pula penduduk bekerja sebagai petani dan usaha-usaha lainnya, terutama penduduk yang tinggal di desa-desa yang tidak bersentuhan dengan laut. Pada 1979, petani di Galesong Utara berjumlah 2.564 dan Galesong Selatan 3.059.⁷⁶ Penduduk yang tidak memiliki tanah garapan bekerja sebagai nelayan, pekerja upahan di lahan tani orang lain, melakukan usaha-usaha kecil, dan atau mencari peruntungan di bidang jasa pelayanan dan pemerintahan.

Di Palalakang, misalnya, bekerja sebagai nelayan atau *patorani* adalah pilihan paling dekat bagi penduduk desa yang permukimannya di samping pantai. Lahan persawahan di desa ini juga cenderung sedikit. Pekerjaan penduduknya cukup beragam, ada di bidang jasa pelayanan, pemerintahan, pedagang dan lain-lain. Namun, jumlahnya terpaut jauh dibanding pekerjaan sebagai nelayan atau petani. Ini juga berlaku pada penduduk Mangindara, Galesong Kota, Boddia,

Baru, Barammase, Bontomarannu, Popo, tetapi nelayan dan petani



Takalar Dalam Angka 1979, *op. cit.*, hlm. 18.

nampak masih menjadi pilihan paling utama kebanyakan penduduk desa tersebut. Nelayan yang banyak di desa ini adalah *patorani*. Pilihan pekerjaan *patorani* sebenarnya sejak lama dilakukan oleh nelayan di desa-desa tersebut, setidaknya bukan yang baru terjadi pada tahun 1970-an.

Di ketiga desa yang paling ramai Boddia, Galesong Kota, dan Galesong Baru, yang posisinya sebagai pusat kecamatan yang memiliki banyak fasilitas pelayanan dibanding lain, sebenarnya memiliki peluang untuk akses pekerjaan lebih beragam. Namun, catatan statistik pada tahun 1995 memperlihatkan bahwa Boddia ataupun Galesong Kota sebenarnya tidak terlalu berbeda secara mencolok akan keragaman jenis pekerjaan jika dibandingkan dengan Mangindara, Bontomarannu, Barammamase, dan Pa'lalakang.

Pekerjaan penduduk di desa ini antara lain: nelayan, petani, pedagang, buruh, jasa, sektor pemerintahan, dan lain-lain. Perbedaannya hanya dari segi jumlah. Kalau petani sendiri di ketiga desa pusat kecamatan tersebut sangat ditopang dengan lahan persawahan yang sangat luas. Pedagang juga sangat tinggi angkanya dengan adanya pasar umum di lingkungan tempat tinggal mereka. Beda halnya Mangindara dan Pa'lalakang yang sangat sedikit areal persawahannya. Namun, pada intinya pilihan menjadi nelayan itu begitu terbuka dengan dukungan pantai dan warisan pengetahuan dari pendahulu sebelumnya.

Khusus untuk daerah pesisir, sejak era 1880-an saja sudah digambarkan keadaan penduduknya begitu padat dan ketersediaan lahan tidak mencukupi untuk secara keseluruhan penduduk Galesong untuk kegiatan pertanian. Lahan ya untuk pertanian, tetapi juga digunakan untuk tambak-tambak udang,



bandeng, dan lain-lain. Pada 1981, lahan tambak di Galesong seluas 253,73 hektare, yang dikelola sebanyak 122 rumah tangga (lihat tabel 2.1.). Rumah tangga pengelola ini sejatinya terbagi lagi, 77 rumah tangga sebagai pemilik dan 45 rumah tangga sebagai buruh.⁷⁷ Dalam kurun sepuluh tahun luas lahan tambaknya bertambah besar, yaitu 280 hektare, dengan jumlah rumah tangga pemilik yang cenderung sama.⁷⁸

Penduduk yang tidak memiliki lahan akan menjadikan laut sebagai tumpuan sumber pendapatan perekonomiannya. Salah satu contohnya adalah Daeng Gading. Keputusan memilih menjadi *patorani* ini karena pekerjaan tersebut adalah pilihan paling dekat dan mungkin baginya. Hal ini didukung dengan pengetahuan dominan yang ia miliki saat itu, yakni tentang melaut atau nelayan. Pengetahuan ini turun dari orang tua yang sebelumnya telah menekuni aktivitas sebagai nelayan, termasuk *patorani*.

Daeng Gading menempuh Pendidikan sampai tamat kelas enam SD (Sekolah Dasar) di Pa'lalakang. Jenjang pendidikan menengah tidak dilanjutkan. Pada masa itu orang bersekolah masih membayar. Karenanya alasan ekonomi, Daeng Gading tidak lagi melanjutkan pendidikannya, dan mulai menjadi nelayan. Tidak hanya dirinya, banyak masyarakat Galesong kala itu, khususnya di Pa'lalakang, tidak dapat mengenyam dan atau tidak menyelesaikan jenjang-jenjang pendidikan formal.⁷⁹



Takalar Dalam Angka 1981, op. cit., hlm. 59.

Takalar Dalam Angka 1991, Takalar: Kantor Statistik Kabupaten Takalar, 1. 169.

Wawancara I Tuan Daeng Gading.

Pilihan pekerjaan seperti petani bagi Daeng Gading tidak memungkinkan sebab ia tidak memiliki lahan untuk pertanian (persawahan). Sementara beraktivitas di laut lebih terbuka mengingat tempat tinggalnya dekat dengan laut yang memiliki limpahan sumber daya untuk dijadikan sumber pendapatan ekonomi. Pengetahuan yang dimiliki mengenai kenelayan menyisahkan persoalan karena fasilitas penangkapan seperti perahu tidak ia miliki. Keadaan inilah yang membawanya bekerja di perahu yang dipimpin orang lain.

Kalau kembali ke belakang pada abad ke-19, pekerjaan sebagai nelayan adalah salah satu yang tidak dikenai pajak. Sementara satu-satunya pajak yang berlaku hanya di bidang pertanian. Ini kemudian menjadi penting, para nelayan, khususnya di Galesong, tidak akan terbebani oleh pajak, sehingga tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk terus pergi ke laut menangkap ikan. Pada saat bersamaan, pengetahuan tentang nelayan menjadi semakin kuat dimiliki oleh para nelayan.

2.3.2. Bergantung pada Sumber Daya Pendukung Milik Orang Lain

Pemilihan pekerjaan sebagai nelayan yang dipengaruhi oleh aspek geografis dan membentuk pengetahuan mereka, pada saat yang sama membawa masyarakat Galesong itu sendiri dalam suatu hubungan sosial yang lebih kompleks. Sebelum pergi ke laut, ada berbagai macam sumber daya yang dipersiapkan. Begitu pun ketika kembali, hasil tangkapan nelayan akan dipasarkan. Namun, ada yang memilih hasil tangkapan itu hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan subsisten.



ni sangat jarang ditemukan, rata-rata untuk tujuan pemasaran. Posisi pedagang, dan pembeli bukan sekadar hubungan dagang yang

memungkinkan distribusi komoditas atau barang, melainkan sebuah potret hubungan sosial yang melibatkan banyak pihak.

Tidak sedikit juga para nelayan akan beralih menjadi petani ketika musim hujan tiba. Ini biasa dilakukan oleh mereka yang memiliki lahan. Sebagiannya lagi masih tetap melanjutkan aktivitasnya sebagai nelayan pencari ikan yang lokasi penangkapannya hanya di sekitar pantai, mengingat kondisi angin dan ombak pada musim hujan tidak memungkinkan untuk melakukan pencarian di tempat jauh. Hal inilah yang biasa terjadi pada nelayan *patorani*.

Daerah ini masih tergolong cukup ‘tertinggal’ sebagai wilayah maritim. Hasil tangkapan laut mereka sebenarnya berkontribusi besar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar, tidak hanya Takalar, bahkan Makassar dan terutama Gowa memperoleh suplai ikan dari Galesong. Tidak jarang pula hasil-hasil tangkapan tersebut di ekspor ke luar negeri, seperti ikan terbang, telur ikan terbang, dan lain sebagainya. Namun, masyarakat atau nelayan Galesong masih sukar menuju pada taraf kemajuan ekonomi. Di sepanjang tahun 1970-an hingga akhir 1990-an, desa-desa di Galesong rata-rata masih berstatus sebagai swakarya, dalam artian masih sebagai desa yang belum mampu mencukupi kebutuhannya secara sendiri.

Hal ini saya kira bukan karena masyarakat itu sendiri belum mampu mengoptimalkan sumber daya sekitarnya secara maksimal. Pilihan pekerjaan sebagai nelayan ini menyisahkan persoalan akan kebutuhan sumber daya material

ig untuk aktivitas melaut. Sumber daya material pada dasarnya tidak



dimiliki oleh banyak masyarakat Galesong yang bekerja sebagai nelayan, sehingga mereka bergantung pada fasilitas sumber daya milik orang lain.

Kebergantungan pada para pemilik sumber daya material tersebut pada gilirannya tidak hanya membentuk hubungan yang berkaitan dengan aktivitas di laut, tetapi juga terjadi di darat. Tidak hanya seorang nelayan tersebut yang bergantung besar kepada pemilik alat-alat perikanan, tetapi pada saat yang sama juga menyeret segenap keluarganya masuk dalam lingkaran hubungan tersebut. Pasalnya, tidak hanya memfasilitasi kebutuhan melaut nelayan, *papalele* juga cenderung memperhatikan keluarga nelayan melalui bantuan, baik dalam bentuk uang maupun barang.

Bantuan tersebut tidak diberikan secara cuma-cuma, gantinya nanti adalah hasil tangkapan yang diperoleh nelayan. Praktik seperti ini setidaknya sudah berlangsung jauh sebelum tahun 1970-an. Di abad 19 misalnya, saudagar-saudagar Tionghoa kerap menyalurkan kredit awal kepada nelayan yang mencari teripang dengan syarat semua harus dijual kembali pada mereka tersebut, dan tentu modal awalnya dikembalikan. Selain orang-orang Tionghoa, penguasa-penguasa lokal juga kerap menginvestasikan modalnya, baik berupa perahu atau pun fasilitas sumber daya lainnya kepada para nelayan untuk menunjang aktivitas perdagangan teripang.⁸⁰

Laut dan sumber dayanya dipandang sebagai akses terbuka untuk berbagai kalangan. Hal inilah yang kemudian menggerakkan segenap pengusaha untuk



Heather Sutherland, Teripang dan Perahu Wangkang: Perdagangan dengan China pada Abad ke-18 (kl. 1720-an – 1840-an), dalam Roger ., *op.cit*, hlm. 95.

memantapkan posisinya dengan penguasaan secara individual atas alat-alat perikanan untuk mencapai keberhasilan ekonomi, misalnya, dalam usaha penangkapan ikan atau telur ikan terbang. Mereka juga melakukan pengembangan usaha dan merekrut *sawi* dari warga desa yang tidak memiliki lahan pertanian⁸¹ atau tidak dapat mengakses pekerjaan lain, selain nelayan.⁸² Daeng Gading sendiri menjelaskan bahwa pada tahun 1970-an para anak buah (*sawi*) sejatinya merupakan orang yang memang telah bekerja sebagai nelayan.⁸³ Olehnya, meskipun mereka tidak memiliki peralatan seperti perahu, dan karena pengetahuan mereka sebatas pada aktivitas nelayan, tidak ada pilihan lain selain tetap bekerja sebagai nelayan.



⁸¹Kalau mengenai tanah di Galesong, pada tahun 1880-an saja sebagaimana umbarkan Kooreman sudah terpakai semua untuk lahan persawahan. Mungsi Lampe, “*Pinggawa-Sawi Nelayan Bugis-Makassar dalam Analisis ternal dan Eksternal*”, *Masyarakat & Budaya*, Vol. 17 No. 1 (2015), hlm.

Wawancara I Tuan Daeng Gading.